



TBNews

TRIBRATA AKTUAL & FAKTUAL



POLRI MENJAGA HARAPAN



TRIBRATAnews Edisi | 2026



Pemulihan Pascabencana Tapanuli Tengah



Pelindung
KAPOLRI, WAKAPOLRI

Penasehat
KADIVHUMAS POLRI

Ketua Pengarah
**KARO PENMAS, KARO PID, KARO MULTIMEDIA,
PENATA KEHUMASAN POLRI UTAMA**

Staf Ahli
PARA KABAG DIVHUMAS POLRI

Pemimpin Redaksi
**KOMBES POL. BAMBANG TJAHJO BAWONO, S.I.K.,
S.H., M.HUM., M.SI.**

Staf Redaksi
**KOMPOL ANGGA HARYA KUSUMA, S.I.K.
PEMBINA AGUSTIN EKAWATI, S.E.
IPTU NIFRINAS YULISTIN RIZKY, S.I.Kom.
PENDA I HARYATI, S.E.
PENDA I FITRI MARIA SIMANJUNTAK, S.Kom.
IPDA I DEWA GEDE YUDHA PERWIRA ADHI
PRADNYANA, S.Kom.
BRIGADIR AMANDA SILFIA, S.H.
BRIPDA ALDI RASYID
BRIPDA IRSYAD KOVA ANUGRAH SIREGAR
BRIPDA CINTA AMELIA PUTRI AHMAD**

Art Director
AGUNG SUPRIYANTO WIDADI, S.Ds.

Fotografer
**BAG PRODDOK
DIVHUMAS POLRI**

Penerbit
**BAG PENSAT
DIVHUMAS POLRI**

Kontributor
SATKER MABES/SATWIL POLDA

Percetakan
PT Arfi Dua Satu

Alamat Redaksi
**Bag PENSAT Biro Penmas Divisi Humas Polri
Jalan Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7218141, 7218770
Faks. (021) 7260208, 7218141**

E D I T O R I A L

Kerja Nyata dan Kepercayaan Publik

Awal tahun selalu menjadi momentum konsolidasi bagi institusi negara, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di tengah dinamika keamanan, tekanan sosial-ekonomi, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, kinerja Polri sepanjang 2025 menjadi penanda penting arah kerja institusi: menjaga stabilitas sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Capaian kinerja sebesar 91,54 persen dengan kategori sangat baik bukan sekadar angka evaluasi. Ia mencerminkan kerja institusional yang berlangsung di berbagai lini—dari penegakan hukum, pelayanan publik, hingga keterlibatan dalam program pembangunan dan operasi kemanusiaan. Di balik capaian tersebut, terdapat upaya menjaga keamanan ruang publik, mengungkap kejahatan strategis, serta memastikan kehadiran negara dirasakan masyarakat.

Penanganan bencana di wilayah Sumatera menjadi salah satu gambaran nyata bagaimana fungsi kepolisian melampaui penegakan hukum. Evakuasi, pelayanan kesehatan, distribusi logistik, hingga pembangunan fasilitas dasar memperlihatkan wajah Polri sebagai pelindung masyarakat dalam situasi paling rentan. Di sisi lain, pengungkapan kasus narkoba, korupsi, perdagangan orang, serta kejahatan siber menunjukkan bahwa fungsi penegakan hukum tetap berjalan dalam skala besar dan terukur.

Kinerja tersebut juga beriringan dengan peran Polri dalam mendukung agenda nasional. Program ketahanan pangan, stabilitas harga, pembangunan infrastruktur sosial, hingga pelayanan pendidikan menjadi ruang kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah dalam memastikan kebijakan negara berjalan hingga tingkat masyarakat.

Namun capaian tidak hanya diukur dari angka atau program. Kepercayaan publik menjadi indikator paling penting. Survei nasional maupun internasional yang menempatkan Polri sebagai salah satu institusi paling dipercaya menunjukkan bahwa legitimasi institusi dibangun dari kerja yang konsisten dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta kompleksitas kejahatan menuntut adaptasi berkelanjutan. Karena itu, reformasi internal penguatan SDM, pengawasan, integritas, dan tata kelola menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan.

Pada akhirnya, arah kerja Polri tidak semata ditentukan oleh target institusi, tetapi oleh kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Kinerja yang baik hanya akan bermakna jika berbanding lurus dengan rasa aman dan kepercayaan publik.

Tahun kerja telah berlalu, namun tanggung jawab tidak pernah selesai. Di situlah letak makna pengabdian: menjaga stabilitas, menegakkan hukum, dan memastikan negara tetap hadir bagi setiap warga. [*]

Redaksi Majalah Tribra News

menerima kiriman naskah atau tulisan tentang Kepolisian atau ilmu pengetahuan umum maupun artikel lainnya.

E-mail: pensat.divhumas@gmail.com



08 laporan **UTAMA**

**Rapim TNI-Polri
Mengawal Arah Kebijakan Negara**

Rapim TNI-Polri 2026 menjadi titik awal penegasan arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasional sebagai langkah konsolidasi institusi dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan.

18 **UNGKAP KASUS**

- PERANG MELAWAN NARKOBA TANPA TOLERANSI



SATGAS PANGAN POLRI
KAWAL HARGA
JELANG HKBN 2026

62

28 **KABAR JAJARAN**

- DI GARIS DEPAN BENCANA, BRIMOB MENJAGA HARAPAN

66 **INSPIRATIF**

- WARUNG TANPA HARGA DI TAMAN PANDANALAS

38 **INOVASI**

- POLRI BANGUN 569 SUMUR BOR, JAWAB KRISIS AIR BERSIH PASCA BANJIR SUMATRA

78 **BUAH BIBIR**

- MANUVER UDARA EKSTREM UNTUK MISI KEMANUSIAAN

54 **BUNGA RAMPAI**

- SPPG POLRI DAN IKHTIAR NEGARA MENJAMIN GIZI ANAK BANGSA



Foto Cover
Evakuasi Korban Banjir
Sumber: Istimewa



TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PREKISI
PEDOMAN - RESPONSI - BERKUALITAS - BERKELANGKAHAN

Kepala Divisi Humas Polri
Mengucapkan



Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

1 Ramadan 1447 Hijriah / 2026 Masehi

Marhaban Ya Ramadan

Semoga bulan suci ini membawa cahaya keberkahan melapangkan hati,
menenangkan jiwa, dan menguatkan langkah dalam setiap kebaikan.

Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P.



Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melepas bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra, Sabtu (14/2/2026), di kompleks Mapolda Sumatra Utara, Medan.

Pelepasan dilakukan bersama Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Ketua Komisi VI DPR Siti Hediati Hariyadi serta dihadiri sejumlah pejabat daerah.

Sebanyak 22 kontainer bantuan diberangkatkan untuk disalurkan ke tiga provinsi terdampak, yakni Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat. Bantuan mencakup bahan pangan, pakaian, perlengkapan tidur, obat-obatan, serta kebutuhan mendesak lain bagi warga yang masih berada di pengungsian.

Kegiatan tersebut didahului dengan peresmian enam gedung baru di lingkungan Mapolda Sumut sebagai bagian dari penguatan sarana pelayanan kepolisian di wilayah tersebut.

Kapolri menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam penanganan bencana merupakan bagian dari komitmen institusi untuk hadir



membantu masyarakat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan.

“Bantuan ini merupakan bentuk kehadiran Polri untuk membantu masyarakat terdampak bencana dan memastikan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi,” ujar Kapolri.

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas dukungan Polri dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan pemanfaatan fasilitas kesehatan milik Polri bagi buruh peserta BPJS Kesehatan sebagai bagian dari dukungan institusi terhadap kesejahteraan pekerja.

Kebijakan tersebut disampaikan saat Kapolri menghadiri peringatan hari ulang tahun Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di pabrik PT Victory Chingluh Indonesia, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2/2026).

Kapolri menegaskan bahwa fasilitas kesehatan Polri di seluruh Indonesia dapat diakses buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Instruksi tersebut telah disampaikan kepada jajaran kepolisian, terutama di wilayah dengan konsentrasi industri dan jumlah pekerja yang tinggi.

“Sudah saya instruksikan kepada seluruh rekan-rekan di seluruh Indonesia agar fasilitas kesehatan milik Polri dapat dimanfaatkan oleh teman-teman buruh yang menggunakan BPJS Kesehatan. Ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mendukung kesejahteraan pekerja,” ujar Kapolri.



Selain penguatan layanan kesehatan, Polri juga mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat melalui pendampingan dan penguatan perlindungan hak-hak pekerja. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan industri dan peningkatan kesejahteraan buruh.



Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka secara resmi Pendidikan dan Latihan Khusus (Diklatsus) Banser Satkorwil Daerah Istimewa Yogyakarta di SPN Selopamioro, Imogiri, Bantul, Sabtu (14/2/2026). Kegiatan tersebut diikuti ribuan anggota Banser dari DIY dan Jawa Tengah serta dihadiri sejumlah tokoh lintas instansi, ulama, dan pejabat daerah.

Dalam arahnya, Kapolri menekankan peran penting keluarga besar Nahdlatul Ulama, termasuk Gerakan Pemuda Ansor, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya dalam menjaga semangat nasionalisme dan persatuan.

“Saya mewakili institusi Polri ingin mengingatkan bahwa perjalanan panjang bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar keluarga besar Nahdlatul Ulama, di dalamnya terdapat Gerakan Pemuda Ansor yang telah berjuang sejak masa perjuangan kemerdekaan,” tegas Kapolri.

Kapolri juga menyoroti keberagaman Indonesia sebagai kekuatan utama bangsa yang harus dijaga melalui persatuan seluruh elemen masyarakat.

“Jika keberagaman itu dapat kita satukan, maka itulah kekuatan terbesar bangsa ini. Namun apabila kita gagal mempersatukannya, maka kehancuran bisa menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.



Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri prosesi pemakaman Meriyati Hoengeng di Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Giritama, Tonjong, Bogor, Rabu (4/2/2026). Almarhumah yang akrab disapa Eyang Meri merupakan istri dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoengeng Iman Santoso.

Kehadiran Kapolri menjadi bentuk penghormatan terhadap keluarga besar Bhayangkara sekaligus mengenang nilai keteladanan

yang selama ini diwariskan almarhumah kepada institusi kepolisian. Menurut Kapolri, Eyang Meri kerap menyampaikan pesan moral yang kuat kepada keluarga besar Polri, khususnya tentang integritas dan pengabdian.

“Beliau selalu berpesan di setiap acara kami, jadilah polisi yang baik, memiliki integritas, dan polisi yang bisa melindungi dan mengayomi,” ujar Kapolri usai prosesi pemakaman.

Kapolri mengungkapkan bahwa pesan tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga terekam dan diputar kembali oleh keluarga saat momen duka. Pesan agar setiap anggota Polri menjadi teladan dan memulai perubahan dari diri sendiri menjadi inspirasi yang terus hidup di lingkungan institusi.

“Beliau selalu sampaikan pesan jadilah contoh teladan dan mulailah dari dirimu sendiri. Itu menjadi spirit bagi kami keluarga besar Polri,” ucapnya. [*]





POLRI MENJAGA HARAPAN

Sepanjang 2025, Polri mencatat capaian kinerja 91,54 persen dengan kategori sangat baik melalui penguatan kamtibmas, penegakan hukum, pelayanan publik, penanganan bencana, serta dukungan terhadap program pemerintah. Kinerja tersebut diiringi reformasi internal dan berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Rapim TNI-Polri Mengawal Arah Kebijakan Negara

Rapim TNI-Polri 2026 menjadi titik awal penegasan arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasional sebagai langkah konsolidasi institusi dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan.





Awal Februari 2026, halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta menjadi titik temu arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan jajaran pimpinan TNI dan Polri, menyampaikan pesan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menegaskan kembali posisi dua institusi tersebut sebagai penyangga utama stabilitas negara.

Rapim TNI–Polri tahun ini hadir dalam konteks yang tidak ringan. Dinamika global, tekanan ekonomi, hingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi menempatkan TNI dan Polri pada garis depan tanggung jawab negara. Dalam forum itulah Presiden menekankan bahwa kekuatan institusi

tidak hanya diukur dari kemampuan tempur atau penegakan hukum, tetapi dari kedekatan dengan rakyat dan kecepatan merespons kebutuhan masyarakat.

Apresiasi terhadap kinerja TNI–Polri selama satu tahun terakhir menjadi bagian penting dari pengarahannya Presiden. Dukungan terhadap program pemerintah, keterlibatan dalam penanganan bencana, hingga peran di wilayah terpencil disebut sebagai bukti nyata kehadiran negara. Namun bersamaan dengan itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan setiap personel tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.



Rapim ini tidak berhenti sebagai forum konsolidasi di tingkat nasional. Arah kebijakan yang disampaikan Presiden segera diturunkan ke tubuh institusi. Sehari setelahnya, Polri menggelar Rapat Pimpinan internal sebagai langkah menerjemahkan pesan strategis tersebut menjadi kebijakan operasional yang siap dijalankan di seluruh wilayah Indonesia.

Rapim Polri 2026

Rapim yang dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo itu diikuti oleh jajaran pimpinan

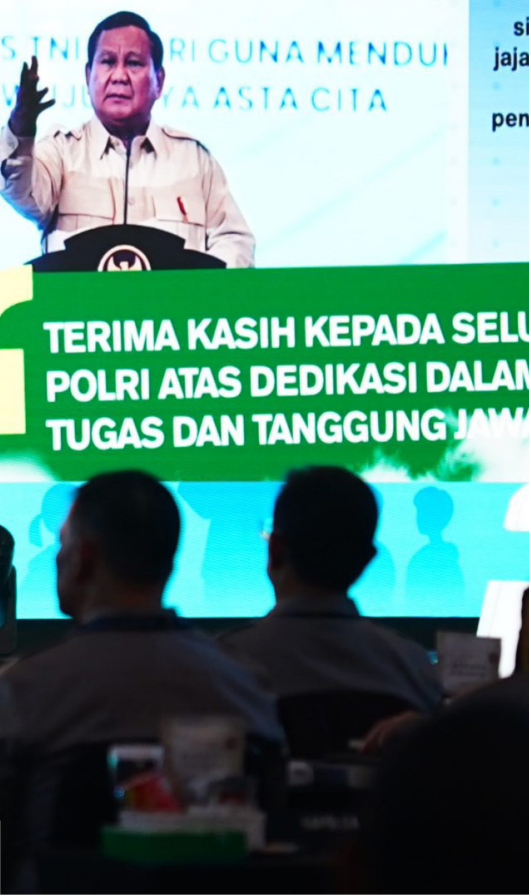
Mabes Polri, para pejabat utama, serta seluruh Kapolda. Forum tersebut menjadi titik konsolidasi internal untuk memastikan seluruh jajaran memahami arah kebijakan negara sekaligus kesiapan institusi menghadapi agenda nasional tahun 2026.

Forum ini juga menegaskan bahwa kebijakan strategis yang disampaikan Presiden harus segera diturunkan menjadi program kerja operasional di tingkat Mabes hingga kewilayahan.

Kapolri menegaskan, Rapim Polri merupakan kelanjutan dari

**Presiden
segera
diturunkan
ke tubuh
institusi.**





konsolidasi nasional sehari sebelumnya, dengan fokus utama memperkuat peran kepolisian dalam mengawal program pemerintah.

“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dari kemarin. Sesuai dengan tema, Polri siap mengawal program kerja pemerintah di tahun 2026,” ujar Kapolri.

Tema “Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung, dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026” tidak hanya menjadi slogan, tetapi arah kebijakan yang harus diterjemahkan menjadi kerja konkret.

- Rapim menjadi ruang evaluasi kinerja sekaligus penegasan kembali komitmen institusi dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- Dalam forum tersebut, Kapolri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Polri, menurutnya, tidak bisa berjalan sendiri dalam mengawal kebijakan negara, melainkan harus terhubung dengan kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain agar setiap program berjalan efektif.



“Ini menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri untuk betul-betul bisa berkolaborasi, mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden bersama kementerian dan pemerintah daerah, sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.

Pelayanan Publik

Penguatan pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa transformasi

: pelayanan kepolisian terus
: dilakukan untuk menjawab tuntutan
: masyarakat terhadap kinerja
: yang cepat, adil, dan transparan.
: Revitalisasi unit pelayanan SPKT di
: seluruh tingkatan menjadi langkah
: konkret yang tengah dijalankan.

: “Salah satunya yaitu revitalisasi
: dilakukan dengan mengaktifkan
: kembali peran Samapta sebagai
: sistem komando terintegrasi yang
: bertanggung jawab merespons
: laporan masyarakat secara cepat,”
: ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.

: Upaya tersebut merupakan

: bagian dari transformasi menuju
: Polri yang profesional, modern, dan
: dipercaya masyarakat. Pelayanan publik
: tidak lagi ditempatkan sebagai fungsi
: administratif semata, tetapi menjadi
: wajah utama institusi dalam membangun
: kepercayaan.

: Seiring itu, Polri juga memperkuat
: perannya dalam menjaga stabilitas
: keamanan sekaligus mendukung
: agenda pembangunan nasional. Dalam
: Rapim, jajaran kepolisian mendapat
: paparan terkait isu-isu strategis seperti
: penanganan inflasi, penguatan ekonomi
: daerah, hingga optimalisasi program



pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan kebijakan ekonomi lainnya.

Masukan dari berbagai narasumber tersebut menjadi bekal bagi jajaran kepolisian untuk menjalankan fungsi pengawalan kebijakan secara kolaboratif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kapolri menegaskan, pengawalan program pemerintah tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepercayaan Publik

Melalui Rapim ini pula, Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas keamanan, pelayanan publik, dan dukungan terhadap pembangunan ditempatkan sebagai satu kesatuan arah kerja institusi.

Di sisi lain, indikator kepercayaan publik terhadap kepolisian menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei Litbang

Kompas, kinerja Polri dalam aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan publik mengalami peningkatan. Capaian tersebut menjadi dorongan sekaligus tanggung jawab bagi institusi untuk terus memperkuat profesionalisme dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

"Alhamdulillah kabar baiknya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kembali meroket," ungkap Komjen Pol Dedi Prasetyo, mengutip hasil survei tersebut.

Rangkaian Rapim Polri 2026 menegaskan bahwa arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden segera diterjemahkan menjadi langkah operasional di tubuh kepolisian. Konsolidasi dilakukan dari tingkat pimpinan hingga kewilayahan agar setiap personel memiliki perspektif yang sama dalam mengawal stabilitas keamanan dan pembangunan.

Melalui forum ini, Polri menempatkan dirinya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang aktif mengawal jalannya kebijakan negara. Dari penguatan pelayanan publik, stabilitas kamtibmas, hingga dukungan terhadap program ekonomi, seluruhnya diarahkan pada satu tujuan: memastikan kehadiran negara dirasakan nyata oleh masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.



L

APORAN UTAMA

Polri 2025:

Kerja Nyata di Tengah Dinamika Nasional





Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat capaian kinerja sebesar 91,54 persen dengan kategori sangat baik sepanjang 2025. Angka tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap enam sasaran strategis dan 17 indikator kinerja institusi yang disusun berdasarkan penilaian kementerian terkait. Enam sasaran strategis tersebut mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan publik, serta pengawasan internal yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani.

“Capaian kinerja Polri tahun 2025 terbagi dalam enam sasaran strategis dan 17 indikator kinerja yang saat ini mencapai rata-rata 91,54 persen dengan kategori sangat baik,” ujar Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI.

Selain evaluasi internal, Kapolri turut menyampaikan indikator eksternal yang menggambarkan persepsi publik terhadap kinerja kepolisian. Global Safety Report yang dirilis 18 September 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-19 dari 140 negara dalam Law and Order Index dengan skor 89. Sebanyak 83 persen responden menyatakan merasa aman berjalan sendiri pada malam hari, menempatkan Indonesia di peringkat ke-25 dari 144 negara.

Survei Litbang Kompas pada November 2025 juga menempatkan Polri sebagai salah satu lembaga negara paling dipercaya publik. Dalam survei tersebut, Polri berada di peringkat ketiga lembaga paling dipercaya sekaligus menempati posisi pertama di antara lembaga penegak hukum.

Menurut Kapolri, capaian tersebut menjadi dasar evaluasi sekaligus tantangan bagi institusi untuk menjaga konsistensi kinerja ke depan.

“Pencapaian ini tentu menjadi kerja keras bagi kita semua untuk terus menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja Polri,” tegasnya.

Rapat kerja bersama DPR tersebut menjadi forum evaluasi tahunan sekaligus ruang pembahasan arah kebijakan dan strategi Polri dalam menghadapi dinamika keamanan nasional pada 2026.

Penanganan Bencana

Di antara kiprah paling menonjol sepanjang 2025 adalah keterlibatan Polri dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra. Operasi kemanusiaan ini disampaikan langsung Kapolri sebagai salah satu kerja lapangan terbesar institusi.

Dalam situasi darurat yang melibatkan ribuan warga terdampak, Polri mengerahkan 4.166 personel gabungan dari kesatuan kewilayahan dan Pasukan Kesiapsiagaan Otonom (PKO) untuk turun langsung ke lokasi bencana.

Personel terlibat dalam evakuasi, pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas umum, trauma healing, edukasi anak-anak di pengungsian, serta pembersihan fasilitas kesehatan, sekolah, perkantoran, tempat ibadah, dan ruang publik terdampak.

Distribusi bantuan dilakukan secara masif. Polri mengerahkan delapan unit helikopter untuk mobilisasi personel dan distribusi logistik serta empat unit kapal untuk misi kemanusiaan.

"Berbagai macam kegiatan tersebut tentunya menjadi bagian dari Polri untuk ikut menjadi representasi negara yang harus bisa hadir mewakili negara untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya," ujar Kapolri.

Dalam fase tanggap darurat, Polri membangun 89 posko bencana, 39 posko kesehatan, serta 23 dapur lapangan. Fasilitas sanitasi juga disiapkan melalui pembangunan MCK di Aceh dan Sumatra Utara.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Polri menargetkan pembangunan 567 fasilitas sumbor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga kini, 341 titik telah aktif dan dimanfaatkan masyarakat.

Pada tahap pemulihan, Polri melakukan perbaikan dan pembangunan 40 unit jembatan. Sebanyak 19 unit telah selesai, tujuh unit dalam proses, dan sisanya dalam tahap distribusi serta perencanaan. Pembangunan tersebar di Aceh (21 jembatan), Sumatra Utara (3), dan Sumatra Barat (16).

Di sektor hunian, Polri mendorong pembangunan 150 unit rumah tetap di Aceh Tamiang di atas lahan hibah seluas enam hektare, serta pembangunan 86 unit asrama di Aceh dan 25 unit asrama di Sumatra Utara bagi masyarakat terdampak.

Penanganan bencana juga diikuti langkah penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana lingkungan.

"Di Sumatra Utara kami menetapkan dua tersangka korporasi dan satu tersangka korporasi. Di Aceh dua korporasi telah kami naikkan ke tahap penyidikan, sementara di Sumatra Barat masih dalam proses penyelidikan," jelas Kapolri.

Capaian kinerja Polri 2025

Sepanjang 2025, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan kinerja positif, yang dibuktikan melalui capaian dalam sejumlah bidang, yakni sebagai berikut.

Kamtibmas

Mewujudkan zero attack dari aktivitas terorisme.

Menekan angka kecelakaan hingga **31,43%** dan tingkat fatalitas **53,42%** dalam Operasi Ketupat 2025.

Mengamankan **13.438** pelaku premanisme.

a

b

c

Ketahanan pangan

Mendirikan 139 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar **430.000** penerima manfaat.

Melakukan panen jagung dengan total luas lahan **429.000 ha**.

Melakukan panen raya jagung serentak kuartal I dan II-2025 dengan total **2,08-2,5 juta ton**.

Penegakan hukum

1 Menindak **23.456** perkara kejahatan dengan barang bukti senilai **Rp6,97 triliun**.

2 Menindak **1.297** perkara judi online dengan barang bukti senilai **Rp922,53 miliar**.

3 Mengidentifikasi **325** kampung narkoba dan mentransformasi **145** di antaranya menjadi kampung bebas narkoba.

4 Memproses **13** perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan aset senilai **Rp1,8 triliun**.

Keamanan ruang siber

Membentuk Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) tipikor dan satgas optimalisasi penerimaan negara.

Membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri.

Mengembangkan pelayanan Super Apps Presisi dan Command Center.

Pemeliharaan perdamaian dunia

Melaksanakan misi kemanusiaan.

Melakukan kerja sama penegakan hukum lintas negara.

Membangun pusat misi internasional kawasan Asia Tenggara di Tangerang Selatan.

"Kami berpegang pada keyakinan bahwa kritik dan saran dari masyarakat adalah dukungan dan energi bagi kami agar terus tumbuh, beradaptasi, serta melakukan pembenahan berkelanjutan."

Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo
Kapolri



Data Polri, 1 Januari-1 Juli 2025

DATA: POLRI | FOTO: ANTARAFOTO | RISET: DASRI | GRAFIS: WASRIL | EDITOR: RANY

Penegakan Hukum

Di bidang penegakan hukum, Polri mencatat sejumlah capaian signifikan.

Pada kasus pencurian dengan kekerasan (curas), tercatat 5.395 perkara dengan 2.939 kasus berhasil diselesaikan, terutama pada jam rawan malam hari dan lokasi publik seperti jalan umum, permukiman, serta pertokoan.

Penanganan narkotika menunjukkan skala operasi yang besar. Polri mengungkap 48.417 kasus dengan 64.046 tersangka serta menyita sekitar 590 ton barang bukti senilai Rp41 triliun yang diperkirakan menyelamatkan 1,79 miliar jiwa. Pada awal 2026, Polri kembali mengamankan 2.012 tersangka dengan barang bukti senilai Rp428,8 miliar.

Di bidang tindak pidana korupsi, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengembalikan aset negara sebesar Rp2,37 triliun. Kasus menonjol antara lain pembangunan PLTU dengan kerugian negara Rp1,6 triliun dan pembiayaan LPEI senilai Rp741,2 miliar.

Penanganan terorisme menunjukkan tren terkendali dengan capaian zero attack sepanjang 2023–2025. Polri juga mengungkap kasus perekrutan 110 anak secara daring oleh jaringan yang tersebar di 26 provinsi.

Di sektor siber dan judi online, Polri mengungkap 665 perkara dengan 741 tersangka, menyita aset Rp1,5 triliun, serta memblokir ribuan rekening dan situs ilegal.

Sementara itu, tindak pidana perdagangan orang mencatat 505 tersangka dan 1.239 korban berhasil diamankan.

Program Prioritas dan Reformasi Internal

Polri juga terlibat dalam berbagai program strategis nasional. Pada program ketahanan pangan, panen jagung mencapai 3,57 juta ton serta pembangunan 18 gudang pangan yang ditargetkan menjadi 28 unit pada 2026.

Dalam program Makan Bergizi Gratis, Polri membangun 1.160 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menargetkan 1.500 unit pada 2026. Sementara, pengendalian harga pangan dilakukan melalui sidak pasar dan operasi pasar murah serta penegakan hukum dengan 102 perkara.

Di sektor pendidikan, Polri mengelola 706 sekolah di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari serta membangun SMA Kemala Taruna Bhayangkara sebagai sekolah unggulan.

Pada sektor infrastruktur sosial, Polri membangun 187 jembatan di 27 provinsi untuk memperkuat akses masyarakat, terutama di wilayah terpencil.

Kapolri juga menegaskan penguatan reformasi internal melalui peningkatan kualitas SDM, pengawasan, dan tata kelola organisasi.

Rekrutmen dilakukan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis), termasuk affirmative action bagi daerah tertinggal, OAP, dan penyandang disabilitas. Penguatan integritas dilakukan melalui program Hugeng Award, Kopolnas Award, serta penerapan predikat Wilayah Bebas Korupsi di 55 satuan kerja.

Transformasi struktural juga dilakukan dengan pembentukan satuan kerja baru di Daerah Otonomi Baru dan IKN serta pembentukan direktorat dan satuan reserse khusus Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang di tingkat Polda dan Polres. [*]





PERANG MELAWAN NARKOBA

TANPA TOLERANSI

Dari pengungkapan 15 kg heroin di Sumatra Utara hingga penangkapan Kapolres Bima Kota yang menyimpan narkoba di kopernya, menegaskan bahwa Polri tidak pandang bulu dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Malam di pesisir Tanjung Balai, Sumatra Utara, berjalan seperti biasa. Kapal-kapal kayu bersandar, buruh pelabuhan pulang satu per satu, dan angin dari Selat Malaka membawa aroma laut yang pekat. Namun bagi tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, malam itu adalah waktu operasi.

Senin, 16 Februari 2026, sekitar pukul 22.34 WIB, tim gabungan bergerak di Jalan Lintas Tanjung Balai-Asahan. Target mereka satu: seorang kurir yang diduga membawa narkoba dalam jumlah

besar. Operasi dilakukan senyap. Tanpa sirene dan tentu saja tanpa hiruk pikuk keramaian.

Dalam hitungan detik, seorang pria berinisial Okto Jefri Sihombing (42) diamankan. Dari tas jinjing besar yang dibawanya, penyidik menemukan 15 bungkus heroin yang dikemas menyerupai plastik teh berwarna kuning dan disembunyikan dalam sebuah tas. Berat totalnya mencapai 15 kilogram.

Pengungkapan ini menjadi salah satu temuan besar pada awal tahun 2026 dalam upaya pemberantasan

narkoba oleh Bareskrim Polri. Penangkapan dipimpin oleh Kasubdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Zusen, dengan Kanit II Subdit IV Kopol Bayu Putra Samara di lapangan.

Saat penangkapan berlangsung, Okto tidak sendirian. Ia dibonceng sepeda motor oleh seorang tukang ojek pangkalan bernama Ali Syahbana (AS). Berdasarkan keterangan awal, Ali mengaku hanya diminta mengantar penumpang dari satu titik ke lokasi tertentu tanpa mengetahui isi barang yang dibawa.



Penyidik masih mendalami peran keduanya. Hasil pemeriksaan menunjukkan Okto berperan sebagai kurir utama, sementara Ali diperiksa lebih lanjut terkait keterlibatannya. Tes urine yang dilakukan terhadap keduanya menunjukkan hasil yang berbeda: Okto Jefri Sihombing: positif mengonsumsi sabu sedangkan Ali Syahbana: positif mengonsumsi sabu dan ganja.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai akan adanya peredaran heroin

di wilayah Sumatra. “Yang mana asal narkotika jenis heroin dari Kota Tanjung Balai (Sumut),” ujar Eko dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Dari hasil pemeriksaan terhadap Okto, diketahui bahwa heroin tersebut dipesan oleh seseorang bernama “Habib” untuk diantarkan menuju ke Simpang Kawat, Kisaran. Keterangan ini menjadi bahan analisis bagi penyidik untuk menyelidiki asal-usul heroin dan jaringan yang ada di baliknya.

Tidak Pandang Bulu

Tak hanya memburu jaringan pengedar di masyarakat, pada kurun

waktu yang hampir bersamaan Polri juga melakukan penindakan di tubuh internalnya. Penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku di luar, tetapi juga menjangkau anggota sendiri ketika terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika.

Bermula dari penangkapan dua asisten rumah tangga anggota Polri Bripta IR dan istrinya, AN, dengan barang bukti sabu 30,415 gram di rumah pribadi mereka. Hasil interogasi belakangan menyeret keterlibatan AKP Malaungi (ML) yang saat itu menjabat Kasat Narkoba Polres Bima Kota.

Pemeriksaan lanjutan oleh Bidpropam Polda NTB menunjukkan

“Yang mana asal narkotika jenis heroin dari Kota Tanjung Balai (Sumut),”





■ AKBP Didik Putra Kuncoro mantan Kapolres Bima Kota

“Berdasarkan keterangan dari AKP ML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini,”

AKP ML positif amfetamin dan metamfetamin. Penggeledahan di ruang kerja dan rumah jabatannya kemudian menemukan lima paket sabu seberat 488,496 gram. Dari AKP ML, pengembangan mengarah ke atas.

“Berdasarkan keterangan dari AKP ML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini,” ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.



Pada Rabu 11 Februari 2026, tim gabungan Biro Paminal Divpropam Polri dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggeledah rumah pribadi AKBP Didik Putra Kuncoro di Tangerang Selatan. AKBP Didik saat itu menjabat sebagai Kapolres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat. Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan sebuah koper berisi Sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 50 butir, alprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir, Ketamin 5 gram.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah AKBP Didik diperoleh dari tersangka AKP ML yang mendapatkannya dari bandar berinisial E.

Berdasarkan pernyataan kuasa hukum AKP Malaungi, Asmuni, uang Rp1 miliar dari bandar berinisial EK diserahkan secara tunai kepada AKBP Didik melalui ajudannya yang dipanggil Ria (Teddy Adrian) pada 29 Desember 2025. Uang tersebut disebut-sebut merupakan permintaan AKBP Didik untuk membeli mobil Toyota Alphard.

UNGKAP KASUS

Polri memastikan sudah mengantongi identitas lengkap bandar berinisial E tersebut dan tengah melakukan pengejaran.

Pada Jumat 13 Februari 2026, AKBP Didik resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Bima Kota. Ia dijerat dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. Didik saat ini menjalani penempatan khusus di Divpropam Polri sembari menanti sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang dijadwalkan pada Kamis 19 Februari 2026 di Biro Wabprof Divpropam Polri.

Sementara itu, hasil gelar perkara Biro Wabprof Divpropam Polri menyimpulkan dugaan pelanggaran kode etik AKBP Didik termasuk kategori berat, melanggar PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Tanpa Toleransi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Polri tidak akan mentolerir segala bentuk penyalahgunaan narkotika, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oknum internal.

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh oknum internal Polri," ujarnya di Mabes Polri.



■ Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso



■ *AKBP Didik Putra Kuncoro saat menjalani sidang etik di gedung TNCC Mabes Polri*

la menambahkan bahwa proses hukum pidana dan kode etik terhadap AKBP Didik akan berjalan paralel secara transparan dan akuntabel.

"Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi. Kami pastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada oknum anggota Polri atau keluarganya. Pimpinan Polri sudah tegas dan menjamin

bahwa tidak ada impunitas bagi personel Polri yang terlibat dalam jaringan narkoba," tegasnya.

Irjen Johnny juga meminta dukungan masyarakat: "Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat sebagai bagian dari wujud komitmen untuk melaksanakan perang secara total terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang membahayakan generasi bangsa Indonesia".

Dua operasi yang berlangsung hanya berselang lima hari ini menunjukkan bahwa perang melawan narkoba berlangsung di dua front sekaligus: eksternal dan internal. Tidak ada toleransi. Tidak ada impunitas. Kini publik menanti hasil sidang etik AKBP Didik pada Kamis, 19 Februari 2026, serta perburuan terhadap "Habib" dan bandar "E" yang masih buron. [*]

BARESKRIM BONGKAR FRAUD DANA SYARIAH INDONESIA, Kerugian Capai Rp2,4 Triliun





■ Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada platform fintech PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Terbaru, penyidik menahan tersangka Mery Yuniarni (MY) yang merupakan mantan Direktur PT DSI, Jumat (13/2/2026).

Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat

keterlibatan tersangka dalam skema investasi fiktif yang berlangsung sejak 2018 hingga 2025 dan menyebabkan kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp2,4 triliun.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penahanan dilakukan setelah tersangka memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, MY sempat tidak menghadiri panggilan pemeriksaan

pada Senin (9/2/2026) karena alasan sakit. Setelah dilakukan pemanggilan kembali, penyidik kemudian memeriksa MY dengan sekitar 70 pertanyaan sebelum memutuskan melakukan penahanan.

"Setelah pemeriksaan terhadap tersangka selesai dilaksanakan, selanjutnya untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka MY," ujar

UNGKAP KASUS

Brigjen Ade Safri. “Penahanan dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan dan pendalaman perkara.”

MY diketahui tidak hanya menjabat sebagai mantan Direktur PT DSI, tetapi juga memiliki posisi strategis di sejumlah perusahaan lain, yakni PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

Dalam perkara ini, penyidik sebelumnya telah menahan dua tersangka lain, yakni TA selaku Direktur Utama PT DSI dan ARL yang menjabat sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham perusahaan.

Bersama MY, ketiganya diduga bekerja sama menjalankan skema investasi berbasis teknologi dengan memanfaatkan platform pendanaan digital milik PT DSI.

PT DSI sendiri merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pihak pemberi dana (lender) dan peminjam (borrower).

Namun dalam praktiknya, penyidik menemukan indikasi manipulasi sistemik yang dilakukan manajemen perusahaan.

Proyek Fiktif

Bareskrim mengungkap modus utama dalam kasus ini adalah pembuatan proyek fiktif dengan mencatut data peminjam aktif (borrower existing). Nama-nama borrower yang masih memiliki perjanjian pembiayaan aktif digunakan kembali seolah-olah memiliki proyek baru, tanpa sepengetahuan pihak terkait.

Data tersebut kemudian ditampilkan dalam platform digital PT DSI untuk menarik minat investor. “Itulah yang kemudian membuat para lender tertarik, bahwa ada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan dan



■ Penggeledahan Tim Subdit II Perbankan Dittipideksus di kantor PT Dana Syariah Indonesia.

mereka masuk untuk melakukan investasi," kata Brigjen Pol. Ade Safri.

Para investor dijanjikan imbal hasil tinggi, berkisar 16 hingga 18 persen. Skema tersebut berjalan selama bertahun-tahun hingga akhirnya terungkap ketika para lender tidak dapat menarik dana mereka.

Kasus ini mulai mencuat pada Juni 2025 ketika para investor berupaya menarik modal pokok beserta keuntungan yang dijanjikan. Namun dana tidak dapat dicairkan.

"Ketika jatuh tempo, para lender tidak bisa melakukan penarikan, baik modal pokok maupun imbal

hasil yang dijanjikan," ujar Ade Safri.

Dari situ, laporan masyarakat mulai masuk dan penyidik melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

Tim Subdit II Perbankan Dittipideksus kemudian melakukan pengeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk dokumen keuangan dan sistem digital perusahaan.

15 Ribu Korban

Berdasarkan hasil audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

"Korban merupakan pemilik modal yang dananya diduga disalahgunakan atau disalurkan tidak sesuai peruntukannya,"

- Brigjen Ade Safri Simanjuntak

total kerugian akibat skema tersebut diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun.

Korban berasal dari kalangan masyarakat luas yang berperan sebagai lender dalam platform tersebut. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 15 ribu orang selama periode 2018-2025.

"Korban merupakan pemilik modal yang dananya diduga disalahgunakan atau disalurkan tidak sesuai peruntukannya," kata Ade Safri.

Selain penipuan, penyidik juga menemukan indikasi penggelapan dana perusahaan, pemalsuan laporan keuangan, serta penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan guna meyakinkan investor.

Bareskrim Polri menegaskan proses penyidikan masih terus berlangsung. Penyidik saat ini mendalami aliran dana, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta aset-aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan untuk kepentingan pemulihan kerugian korban.

Kasus ini menjadi salah satu perkara besar di sektor fintech pendanaan digital, sekaligus pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi, serta memastikan legalitas, transparansi, dan risiko sebelum menanamkan modal.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, antara lain penggelapan dalam jabatan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu dan tindak pidana pencucian uang. [*]



■ Dirut PT DSI yang sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan Taufiq Aljufri dan pengacara (atas) dan penyidik Bareskrim Polri (bawah).



Di Garis Depan Bencana, Brimob Menjaga Harapan

Dari Banjir Sumatra hingga Longsor, Erupsi, dan Banjir Bandang di Berbagai Daerah



■ *Brimob selalu berada di garda terdepan untuk membantu korban bencana*



■ Bencana tanah longsor di Cisarua Bandung Barat

Hujan yang turun berhari-hari pada akhir 2025 menjadi awal dari rangkaian bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Sungai meluap, lereng runtuh, dan gunung memuntahkan material vulkanik. Di tengah situasi itu, Korps Brimob Polri bergerak di banyak titik—dari Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Utara membawa satu misi yang sama: menyelamatkan dan memastikan warga tetap bertahan.

Menembus Banjir Sumatra

Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Jambi menjadi ujian berat bagi ribuan

warga. Permukiman terendam, akses transportasi terputus, dan masyarakat terpaksa mengungsi. Dalam situasi darurat itu, Korps Brimob Polri hadir menjalankan misi kemanusiaan melalui evakuasi, pengamanan wilayah, hingga dukungan pemulihan pascabencana.

Penanganan dilakukan secara terkoordinasi berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/3796/XII/OPS.2./2025 tentang penugasan personel Bantuan Kendali Operasi di wilayah terdampak. Surat tersebut menjadi

dasar pengerahan kekuatan Brimob untuk membantu operasi kemanusiaan di lapangan.

Medan yang dihadapi tidak mudah. Arus banjir deras, cuaca fluktuatif, dan akses jalan terputus menuntut kesiapsiagaan tinggi. Dengan perahu karet, peralatan SAR, dan kendaraan operasional, personel Brimob mengevakuasi warga dari rumah-rumah yang terendam terutama anak-anak, lansia, dan warga dengan keterbatasan mobilitas.

Di Aceh, evakuasi difokuskan pada kawasan bantaran sungai

yang terdampak paling parah. Sementara di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, Brimob bersama unsur Polri dan instansi terkait menyisir wilayah terdampak, memastikan tidak ada warga yang tertinggal sekaligus mengamankan lingkungan pascabencana.

Ketika air mulai surut, persoalan baru muncul: krisis air bersih. Untuk menjawab kebutuhan itu, Brimob mengerahkan unit water treatment

mobile yang mampu mengolah air tercemar menjadi layak pakai. Di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, fasilitas ini menjadi sumber air bersih bagi warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara keseluruhan, delapan unit disiagakan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Kebutuhan pangan juga menjadi perhatian utama. Sebanyak 13 kendaraan dapur lapangan

(randurlap) disiapkan untuk menyediakan makanan siap santap bagi warga terdampak dan petugas di lapangan.

Di Jambi, respons cepat dilakukan personel Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jambi di Desa Lubuk Suli, Kabupaten Kerinci. Ketika debit air meningkat, tim SAR diterjunkan mengevakuasi warga menggunakan perahu karet, dengan prioritas



■ Bencana banjir di wilayah Aceh





■ Bencana banjir di wilayah Cilacap, Jawa Tengah



Beberapa korban berhasil dievakuasi, namun hujan deras kembali memaksa operasi dihentikan sementara demi keselamatan petugas.

kelompok rentan. Rangkaian penugasan ini menunjukkan keterlibatan Brimob dalam seluruh fase penanganan bencana dari evakuasi hingga pemulihan.

Bencana Longsor

Malam di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap, berubah menjadi ruang penuh kecemasan ketika longsor besar menimbun puluhan rumah warga. Tanah masih bergerak, hujan belum berhenti, dan setiap menit terasa menentukan.

Polresta Cilacap bersama Satuan Brimob Polda Jawa Tengah langsung bergerak. Sebanyak 60 personel diberangkatkan membawa perlengkapan SAR lengkap tenda pleton, tali karmantel, helm, hingga peralatan manual seperti cangkul dan sekop. Kendaraan taktis dan truk personel menembus malam menuju lokasi.

Personel tiba dini hari dalam kondisi tanah labil. Koordinasi dilakukan bersama Basarnas, BPBD, relawan, dan pemerintah desa.

Operasi pencarian dimulai dengan peralatan manual karena medan tak memungkinkan penggunaan alat berat.

Beberapa korban berhasil dievakuasi, namun hujan deras kembali memaksa operasi dihentikan sementara demi keselamatan petugas. Medan berat, cuaca tak menentu, dan ancaman longsor susulan menjadi tantangan utama.

"Kami bersinergi dengan Brimob, TNI, Basarnas, BPBD,

dan relawan. Medan berat dan cuaca berubah-ubah, tapi kami terus bergerak karena setiap menit sangat berarti bagi korban,” ujar Kapolresta Cilacap di posko bencana.

Sementara itu di Lumajang, Jawa Timur, Satuan Brimob Polda Jatim memperkuat kehadiran pasca erupsi Gunung Semeru. Kegiatan kemanusiaan terpadu digelar di Desa Supiturang dengan mengerahkan dapur lapangan yang menyediakan ratusan porsi makanan setiap hari bagi pengungsi dan tim SAR.

Personel juga terlibat dalam pembersihan abu vulkanik, penyisiran zona bahaya, dan evakuasi warga menuju hunian tetap. Tak hanya aspek fisik, perhatian diberikan pada pemulihan psikologis korban, khususnya anak-anak, melalui kegiatan trauma healing.

Seiring kondisi membaik, aktivitas masyarakat berangsur pulih dan operasi SAR resmi dihentikan setelah lebih dari sepuluh hari. Kehadiran Brimob memastikan masa transisi berjalan lebih aman dan tertata.

Memulihkan Kehidupan

Banjir bandang di Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, meninggalkan kerusakan besar. Satuan Brimob Polda Sulut bergerak membantu pemulihan awal dengan membagikan makanan siap saji, menyalurkan air bersih, serta membersihkan rumah warga dari material banjir.

Kendaraan dapur lapangan dan water treatment dikerahkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Distribusi bantuan dilakukan merata sesuai kebutuhan lapangan.





■ Personel Brimob membantu warga melakukan pembersihan pasca banjir

“Kami mendukung penuh seluruh personel dan peralatan yang diturunkan. Kehadiran Brimob diharapkan meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana,”

“Kami mendukung penuh seluruh personel dan peralatan yang diturunkan. Kehadiran Brimob diharapkan meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana,” ujar Dansat Brimob Polda Sulut Kombes Pol. Robby Samban.

Rangkaian peristiwa di berbagai wilayah tersebut menunjukkan satu pola yang sama: Brimob hadir sejak fase darurat hingga pemulihan awal. Evakuasi korban, penyediaan air bersih, distribusi logistik, hingga pemulihan lingkungan dilakukan secara terpadu bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan, dan relawan.

Di tengah banjir, longsor, erupsi, dan banjir bandang, peran Brimob bukan sekadar menjalankan tugas operasional. Kehadiran mereka menjadi penanda bahwa negara tetap ada ketika masyarakat berada dalam situasi paling sulit.

Karena bagi Brimob, misi kemanusiaan bukan hanya perintah kedinasan melainkan panggilan pengabdian. Di setiap langkah evakuasi dan setiap bantuan yang disalurkan, tersimpan satu tujuan yang sama: memastikan harapan warga tidak ikut tenggelam bersama bencana. [*]

Longsor Cisarua,
DVI Polda Jabar
**Pastikan
Identitas
80 Korban**



Langit di atas Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, masih diselimuti kabut tipis ketika aktivitas di Pos Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat terus berjalan. Di tengah suasana duka yang belum surut, deretan kantong jenazah datang silih berganti dari lokasi longsor, dibawa tim SAR gabungan yang

bekerja tanpa henti sejak bencana terjadi.

Di ruang forensik RS Sartika Asih, para personel DVI bekerja dalam ritme yang sunyi namun intens. Mereka memeriksa setiap temuan, mencatat detail sekecil apa pun, lalu mencocokkannya dengan data keluarga korban. Bau tanah basah bercampur aroma bahan kimia forensik menjadi bagian

dari keseharian tim yang berupaya mengembalikan identitas bagi para korban.

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat tercatat telah menerima puluhan kantong jenazah dari lokasi bencana. Hingga proses berjalan, sebanyak 80 jenazah berhasil diidentifikasi dari total kantong yang diterima tim SAR gabungan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, didampingi Kabid Dokkes Polda Jabar, memaparkan perkembangan proses identifikasi korban menerima total 101 kantong jenazah dari lokasi bencana.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 jenazah berhasil diidentifikasi secara akurat oleh tim medis forensik. Proses ini tidak sederhana. Dalam beberapa kasus, satu individu ditemukan dalam beberapa kantong jenazah yang terpisah.

"Tim DVI menemukan sedikitnya tiga korban yang bagian tubuhnya tersebar di enam kantong jenazah berbeda. Dengan ketelitian forensik, setiap bagian tubuh dipastikan kembali dipersatukan sebelum identitas korban diumumkan kepada keluarga," jelas Kabidhumas Polda Jabar.

Sementara itu, Kabid Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jabar Kombes Pol Iwansyah mengatakan seluruh jenazah yang belum teridentifikasi dibawa ke RS Sartika Asih dan ditempatkan di lemari pendingin berbentuk kontainer untuk menjaga kondisi tetap stabil.

"Seluruh jenazah yang belum teridentifikasi dibawa ke RS Sartika Asih dan ditempatkan di lemari pendingin berbentuk kontainer," ujarnya.

Di Tengah Keterbatasan Proses identifikasi tidak berlangsung mudah. Kondisi jenazah yang telah tertimbun material longsor selama berhari-hari membuat perubahan jaringan tubuh terjadi cukup signifikan, sehingga

Kondisi jenazah yang telah berada di lokasi lebih dari enam hari juga memperberat proses identifikasi.

pengenalan visual hampir mustahil dilakukan. Metode forensik, terutama pencocokan DNA, menjadi kunci utama.

Sejak awal, keluarga korban yang melapor diminta menyerahkan sampel DNA guna mempercepat proses pencocokan. Setiap temuan baru dari lokasi bencana langsung diperiksa tanpa menunggu operasi pencarian selesai.

Namun, tantangan terbesar muncul ketika tidak semua kantong jenazah berisi tubuh korban secara utuh. Beberapa di antaranya hanya berupa bagian tubuh. "Dari 15 kantong jenazah yang masih diperiksa, ada dua yang berisi kulit kaki dan kulit tangan. Mudah-mudahan bisa teridentifikasi," ujarnya.

Di sisi lain, terdapat pula temuan tulang belulang yang setelah diperiksa ternyata tidak berkaitan dengan korban longsor karena diperkirakan telah berusia lebih dari satu tahun.

Kondisi jenazah yang telah berada di lokasi lebih dari enam hari juga memperberat proses identifikasi. Pembersukan dan perubahan jaringan menjadi tantangan tersendiri bagi tim forensik.

Meski demikian, pihak kepolisian memastikan seluruh metode ante mortem dan post mortem tetap digunakan secara maksimal untuk menggali data identitas korban.

Layanan Tetap Dibuka

Meski operasi pencarian resmi telah ditutup, layanan identifikasi korban tetap berjalan. Pos DVI terus menerima laporan keluarga yang kehilangan anggota keluarganya sekaligus melakukan pencocokan data.

"Secara formal operasi ditutup, tapi pelayanan masih kami buka sampai semua jenazah di RS Sartika Asih teridentifikasi," kata Iwansyah.

Setiap hasil identifikasi yang telah dinyatakan cocok akan segera diumumkan dan diserahkan kepada keluarga untuk proses pemulasaraan dan pemakaman. Jika belum ditemukan kecocokan, proses pemeriksaan akan diulang dengan pembandingan lainnya.





Tragedi longsor di Desa Pasirlangu menjadi salah satu bencana paling berat yang terjadi di wilayah tersebut. Operasi pencarian dan pertolongan berlangsung selama 22 hari sebelum akhirnya resmi ditutup, Sabtu (14/2/2026). Selama proses tersebut, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 101 kantong jenazah dari lokasi longsor. Sebagian besar korban telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat, sementara sejumlah lainnya masih dalam proses pemeriksaan lanjutan. Hingga operasi berakhir, masih terdapat korban yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Pemerintah daerah bersama tim SAR dan kepolisian terus melakukan pemantauan serta pendampingan kepada keluarga korban. [*]





Polri Bangun 569 Sumur Bor, Jawab Krisis Air Bersih Pasca Banjir Sumatra



Setelah air menghancurkan segalanya, justru air pula yang paling banyak dicari. Ironi ini kerap muncul di wilayah terdampak banjir, ketika air bersih menjadi kebutuhan pertama yang hilang saat bencana datang.

Di sejumlah daerah terdampak, warga harus bertahan sehari-hari tanpa air bersih. Ada yang terpaksa menggunakan air banjir untuk mencuci dan mandi, sementara untuk minum dan memasak mereka menunggu distribusi bantuan.

Antrean jeriken menjadi pemandangan umum di lokasi pengungsian, menandai betapa air bersih berubah menjadi kebutuhan paling mendesak setelah bencana.

Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir 2025 tak hanya merusak permukiman, tetapi juga memicu krisis air bersih di tengah masyarakat. Sumur warga tertimbun lumpur, jaringan air bersih terputus, sementara sumber air yang tersisa tidak lagi layak

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam kondisi tersebut, Polri bergerak menghadirkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor di wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses air bersih setelah bencana berlalu.

Polri menargetkan pembangunan 569 sumur bor di wilayah terdampak. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, tingkat kerusakan sumber air, serta aksesibilitas lokasi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan hingga awal Januari 2026, pembangunan telah terealisasi di 249 titik.

"Sebanyak 249 titik telah terealisasi, terdiri atas 236 titik aktif dan 13 titik masih dalam proses pembangunan," ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

"Sebanyak 249 titik telah terealisasi, terdiri atas 236 titik aktif dan 13 titik masih dalam proses pembangunan,"

- Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko



■ Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko



■ Perlu membangun ratusan sumur bor untuk membantu korban bencana

Program pembangunan sumur bor difokuskan pada tiga provinsi yang paling terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebagai bagian dari upaya pemulihan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana.

Di Provinsi Aceh, dari total rencana 389 titik, sebanyak 171 sumur bor telah terealisasi. Sebanyak 167 titik telah aktif dan empat titik masih dalam proses pembangunan. Pembangunan tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah,

Bener Meriah, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Barat, Pidie, Nagan Raya, dan Singkil. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah prioritas dengan realisasi terbanyak karena tingkat kerusakan sumber air warga yang cukup besar pascabanjir.

Di Sumatra Utara, rencana pembangunan 30 titik sumur bor telah terealisasi seluruhnya dan berstatus aktif. Sumur bor tersebut tersebar di Kabupaten Langkat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah.

Sementara itu di Sumatra Barat, sebanyak 48 titik telah

terrealisasi dari total rencana 150 titik. Sebanyak 38 titik telah aktif, sementara delapan titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Pembangunan dilakukan di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang Panjang, Bukittinggi, dan Kota Solok.

Pembangunan sumur bor ini menjadi bagian dari upaya Polri mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Pembangunan sumur bor ini merupakan langkah nyata Polri untuk membantu masyarakat terdampak bencana agar tetap memiliki akses terhadap air bersih. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Selain pembangunan sumur bor, Polri juga menyalurkan berbagai fasilitas pendukung sanitasi dan distribusi air bersih, seperti toilet portabel, pembangunan MCK, distribusi air bersih melalui mobil tangki, tangki air, jet pump, serta

• ratusan tandon air di wilayah terdampak.

• Di lapangan, kehadiran fasilitas tersebut menjadi penopang kehidupan warga selama masa transisi pascabencana. Air bersih tidak hanya dibutuhkan untuk konsumsi, tetapi juga untuk mencegah munculnya penyakit, menjaga kebersihan lingkungan, serta membantu aktivitas rumah tangga kembali berjalan.

• Sumur-sumur bor yang mulai aktif perlahan mengubah situasi di kampung-kampung terdampak.

• Warga tak lagi sepenuhnya bergantung pada distribusi bantuan harian. Ember dan jeriken yang sebelumnya mengantre kini mulai terisi dari sumber air yang lebih dekat dan dapat digunakan setiap hari.

• Bagi masyarakat, air bersih bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan penanda bahwa kehidupan mulai kembali normal. Dapur kembali mengepul, anak-anak bisa mandi tanpa harus menunggu bantuan, dan lingkungan perlahan pulih dari sisa bencana.

• Di titik itulah pembangunan sumur bor tidak hanya menjadi proyek pemulihan infrastruktur, tetapi juga bagian dari proses mengembalikan harapan. Penanganan bencana tidak berhenti saat air surut, tetapi berlanjut pada memastikan warga mampu bertahan, sehat, dan memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih layak. [*]





e-BPKB: Standar Baru Keamanan Dokumen Kendaraan



Pemalsuan dokumen kendaraan bermotor masih menjadi salah satu tantangan dalam sistem administrasi kepemilikan di Indonesia. Dalam sejumlah kasus, BPKB palsu kerap digunakan untuk melegalkan kendaraan hasil kejahatan atau memanipulasi transaksi jual beli.

Menjawab persoalan tersebut, Korlantas Polri menghadirkan e-BPKB yang dilengkapi teknologi chip RFID (Radio Frequency Identification) dan QR Code (Quick Response Code) sebagai langkah penguatan keamanan dokumen kendaraan.

Inovasi yang berjalan sejak 2025 ini tidak hanya ditujukan untuk menekan praktik pemalsuan, tetapi juga memperkuat sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara lebih modern dan terintegrasi.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol. Wibowo menyebut bahwa e-BPKB tetap berbentuk fisik, namun ukurannya lebih kecil dibandingkan BPKB sebelumnya.

"Dokumen ini dilengkapi teknologi keamanan tingkat tinggi berupa chip RFID dan QR Code yang dirancang untuk meminimalkan risiko pemalsuan, kehilangan, maupun penyalahgunaan data," kata Brigjen Pol. Wibowo.

Pengaman Berlapis

Teknologi tersebut menjadi pembeda utama antara BPKB sebelumnya dengan e-BPKB. Chip RFID yang tertanam di dalam dokumen memungkinkan penyimpanan data kendaraan secara elektronik serta terhubung langsung dengan sistem basis data Korlantas Polri. Sementara itu, QR Code berfungsi sebagai sarana autentikasi yang dapat dipindai untuk memastikan keaslian dokumen dan kesesuaian informasi kendaraan secara cepat dan akurat.





No. Blanko : S03302459

DATA BPKB

Nama Pemilik	EDWARD GERALDINO
NIK Pemilik	1234567890123456
Nomor Polisi	X 12345 XX
Nomor Rangka	NOKA1234567890
Nomor Mesin	MSN123456
Merek	MITSUBISHI



Pindai Buku BPKB dengan NFC

Dekatkan buku BPKB pada bagian belakang ponsel Anda

■ e-BPKB yang dilengkapi teknologi chip RFID (Radio Frequency Identification) dan QR Code (Quick Response Code)

Penerapan Nasional e-BPKB

Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Sumardji mengatakan bahwa penerapan e-BPKB telah dimulai secara bertahap di seluruh jajaran.

"e-BPKB diterapkan pada bulan Maret 2025 di seluruh pelayanan unit BPKB di tingkat Polda seluruh jajaran," ujarnya.

Kombes Pol Sumardji menambahkan bahwa pengembangan BPKB elektronik bertujuan memperkuat keamanan dokumen kepemilikan kendaraan.

"Tujuannya untuk membangun pelayanan penerbitan BPKB elektronik yang manfaatnya dapat lebih menjamin keabsahan dokumen kepemilikan dengan security yang lebih safety, dan tentunya dilengkapi teknologi chip RFID. Ini berbeda dengan BPKB yang printing," jelasnya.

Adanya kedua teknologi tersebut membuat e-BPKB memiliki sistem pengamanan berlapis yang jauh lebih kuat dibandingkan BPKB sebelumnya. Proses verifikasi tidak lagi hanya bergantung pada pemeriksaan fisik semata, tetapi diperkuat dengan integrasi digital yang lebih sulit dimanipulasi.

Pengembangan e-BPKB tidak hanya menghadirkan pembaruan pada bentuk dokumen, tetapi juga mengubah pendekatan pengelolaan administrasi kendaraan bermotor. Jika sebelumnya validasi lebih bertumpu pada pemeriksaan fisik, kini sistem digital menjadi referensi utama dalam memastikan keaslian dan kesesuaian data kendaraan. Dokumen fisik tetap digunakan, namun berfungsi sebagai representasi yang terhubung langsung dengan basis data resmi.

Pendekatan ini memperkuat akurasi registrasi kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan ketertelusuran data kepemilikan. Setiap perubahan administrasi tercatat dalam sistem, sehingga proses mutasi, balik nama, maupun penggantian dokumen dapat dipantau secara lebih sistematis dan akuntabel.

Kemudahan Verifikasi

Tidak hanya dilengkapi dengan RFID dan QR Code, e-BPKB juga dilengkapi dengan fitur NFC (Near Field Communication) yang dapat diakses dengan perangkat pintar. Melalui aplikasi e-BPKB Mobile, masyarakat dapat melakukan pengecekan dan verifikasi data kendaraan dengan lebih mudah, cukup dengan mendekatkan dokumen ke perangkat yang mendukung NFC.

Kombes Pol Sumardji menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk memastikan keaslian dokumen.

"e-BPKB ini memudahkan masyarakat dalam memverifikasi, khususnya keaslian e-BPKB yang dimiliki oleh masyarakat, dengan mengunduh aplikasi e-BPKB mobile di Android dan iOS, tinggal scan secara otomatis nanti langsung akan muncul data yang ada pada e-BPKB itu," ungkapnya.

Dukungan Penegakan Hukum
Dari sisi operasional kepolisian, e-BPKB turut mendukung fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagai bagian penting dalam penegakan hukum. Akses terhadap data yang terintegrasi memungkinkan petugas melakukan verifikasi



■ *Diregident Korlantas Polri Brigjen Pol. Wibowo*



■ Pengurusan surat kenderaaan bermotor (Ilustrasi)

secara lebih cepat dan presisi, baik dalam pelayanan administrasi maupun kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan kenderaaan bermotor.

Implementasi e-BPKB juga diarahkan untuk terhubung dengan ekosistem layanan kenderaaan lainnya, seperti pelayanan Samsat, mutasi kenderaaan, hingga proses administrasi kepemilikan. Integrasi ini diharapkan mampu mempercepat alur pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kenderaaan yang tidak sesuai ketentuan.

Kombes Pol Sumardji menambahkan bahwa pengembangan e-BPKB akan terus dilakukan.

“Saat ini penerapan masih di tingkat Polda, ke depan akan dikembangkan ke seluruh pelayanan unit BPKB di tiap polres jajaran,” pungkasnya.

Dalam jangka panjang, e-BPKB menjadi bagian dari transformasi layanan publik berbasis teknologi di lingkungan Polri. Modernisasi administrasi kenderaaan tidak hanya berorientasi pada keamanan dokumen, tetapi juga pada efisiensi pelayanan, transparansi proses, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem registrasi kenderaaan bermotor.

Dengan berbagai pembaruan tersebut, e-BPKB menjadi langkah strategis Korlantas Polri dalam memperkuat sistem

administrasi kenderaaan bermotor di era digital. Inovasi ini tidak hanya menghadirkan dokumen kepemilikan yang lebih aman dan sulit dipalsukan, tetapi juga memberikan kemudahan layanan melalui integrasi teknologi yang semakin modern.

Ke depan, penerapan e-BPKB akan terus diperluas secara bertahap dengan target seluruh kenderaaan baru wajib menggunakan e-BPKB pada 2027. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri yang semakin transparan dan terpercaya. [*]

Green Policing, Pemolisian yang Berpihak pada Lingkungan



PERINGATAN

**DILARANG MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN DI AREA INI
BAGI YANG MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN DAPAT
DIKENAKAN SANKSI PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN
DAN DENDA PALING BANYAK 100 (SERATUS) MILYAR RUPIAH
SESUAI DENGAN PASAL 158 UU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

LINDUNGI LINGKUNGAN DAN MASA DEPAN KI

Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak papan peringatan oleh atas nama penguasa umum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutup dengan papan peringatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bul (Pasal 232 Ayat 1 KUHP)





Di tengah lanskap Provinsi Riau yang kaya akan sumber daya alamnya, belakangan Bumi Lancang Kuning ini justru sibuk bergelut dengan persoalan lingkungan. Kebakaran dan deforestasi telah menjadikan provinsi tersebut mengalami penyusutan tutupan hutan yang ekstrem selama dua dekade terakhir.

Dari hutan tropis seluas 5,6 juta hektare, kini Riau hanya tinggal memiliki 1,1 juta hektare sisanya. Kekayaan alam yang melimpah itu seolah diuji oleh tantangan yang mengancam kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang.

Carut marut permasalahan tersebut mendorong semangat baru mengalir di barisan kepolisian. Bukan sekadar soal penegakan hukum semata, tetapi jauh menapaki hal fundamental. Di tangan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Polda Riau kini memiliki paradigma baru, yaitu paradigma kepolisian yang berpihak kepada pelestarian lingkungan. Inilah Green Policing gagasan yang lahir dari visi hijau Kapolda Riau.

Paradigma Berbasis Ekologis

Green Policing atau pemolisian berbasis ekologis adalah pendekatan yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas kepolisian. Menurut Irjen Pol Herry, Green Policing ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekologis. Konsep ini tidak sekadar berfokus pada pereboisian, melainkan merambah kepada upaya untuk mengubah pola pikir 'hijau' (Green Thinking) hingga kebiasaan (Green Habit) di masyarakat.

Filosofi ini dibangun di atas tiga fondasi: ontologis, menegaskan lingkungan sebagai bagian dari peradaban dan keamanan; epistemologis, berbasis nilai keadilan dan pemahaman kompleksitas sosial-ekologis; serta aksiologis, yang diwujudkan melalui

**"PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"
 n Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum
 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU**



■ Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan

tindakan nyata seperti pencegahan kebakaran, penindakan mafia lingkungan, dan penyelesaian konflik lahan. Dari ketiga fondasi tersebut, Green Policing Polda Riau dijalankan melalui tiga strategi utama, yaitu represif, preventif, dan restoratif.

"Sepanjang tahun 2025, kami tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan, pemulihan, dan keterlibatan masyarakat. Ini adalah kerja bersama seluruh elemen," kata Irjen Pol Herry Heryawan.

Pemulihan Lingkungan

Pada pengimplementasiannya, strategi represif diwujudkan dengan pembentukan tim gabungan yang menangani perambahan hutan, pertambangan ilegal, dan kasus kebakaran hutan dan lahan. Langkah tegas ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan sekaligus menjaga kestabilan ekosistem. Hingga saat ini, Polda Riau mencatat sebanyak 70 tersangka kasus karhutla telah dilakukan upaya paksa.

Sementara itu, strategi preventif diwujudkan melalui sosialisasi, kampanye publik, pengadaan bank sampah, satkamling hijau, pembentukan komunitas, jambore karhutla, hingga bakti religi. Pendekatan sosialisasi ini tak hanya menasar orang dewasa, anak-anak sekolah pun menjadi target edukasi agar nilai-nilai Green Thinking dan Green Habit tertanam sejak dini. Hingga saat ini, Polda Riau telah menjangkau 3.398 atau sekitar 45,1 persen lembaga pendidikan dari jumlah keseluruhan dalam kurun waktu 10 bulan terakhir.

"Kami ingin anak-anak sejak dini paham bahwa menanam pohon adalah menanam harapan untuk anak cucu. Ribuan kegiatan telah kami lakukan agar kesadaran ini tertanam dan menular hingga mereka dewasa nanti," kata Irjen Pol Herry.

Adapun strategi restoratif diwujudkan melalui reboisasi, pemberian bibit pohon sebagai hadiah bagi anggota yang berulang tahun, saat serah terima jabatan, maupun sebagai kado pernikahan. Selain itu, intervensi sosial juga

dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah aliran sungai.

"Mungkin sebagian masyarakat merasa aneh kenapa Kapolda memberi hadiah pohon. Namun, kami ingin menjadikan ini tradisi. Setiap kunjungan kerja pun kami wajibkan menanam pohon," jelas Irjen Pol Herry.

Melalui strategi restoratif, Polda Riau meluncurkan berbagai terobosan pendukung untuk merealisasikan konsep Green

Policing. Tabung Harmoni Hijau dan Bank Pohon menjadi wujud nyata produk Green Policing.

Keduanya berfungsi sebagai wadah penyediaan bibit secara berkelanjutan sekaligus menjadi tempat pelatihan kewirausahaan bagi anggota polisi yang memasuki masa purna tugas. Selain itu, Tabung Harmoni Hijau menjadi prototipe hilirisasi yang mengintegrasikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Riau, di mana perkebunan, pembibitan, dan peternakan yang dikelola di lokasi ini disiapkan untuk memasok bahan baku ke Dapur SPPG.

Implementasi Green Policing ini tak lepas dari kerja sama antar pemangku kepentingan. Keberhasilan pemolisian berbasis ekologis dilakukan melalui kerja sama struktural, mulai dari Polda hingga Polsek, serta kultural, yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pelaku budaya, dan generasi muda. Pendekatan lintas sektor ini memastikan program tidak hanya dijalankan di tingkat aparat, tetapi juga menyentuh masyarakat secara langsung.

Dengan inovasi Green Policing, Polda Riau membuktikan bahwa kepolisian bisa lebih dari sekadar penegak hukum. Upaya ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran ekologis mendasar di masyarakat. Menanam pohon hari ini bukan hanya menata hutan, tetapi menanam harapan bagi generasi mendatang.

"Menjaga kelestarian hutan adalah kewajiban moral kita semua agar Riau bisa tumbuh seperti sedia kala," tutupnya. [*]



Menyusuri Jantung

LAYANAN DARURAT 110 POLRI





Dalam Keadaan Darurat & Butuh Layanan Polri?

HUBUNGI CALL CENTER 110



Bebas Biaya dan Layanan 24 Jam

Di sebuah ruangan di Mapolresta Bareleng, Batam, detik-detik kecil itu terukir dalam layar monitor. Sebuah panggilan masuk pukul 18.33, 22 Desember 2025. Di ujung sana, seorang perempuan bernama Anggi melapor dengan suara gugup. Ada ancaman. Seorang ayah diduga mengejar menantunya dengan senjata tajam.

Potensi gangguan keamanan, potensi luka, potensi hilangnya nyawa, menggantung di ujung telepon. Di ruang yang sama,

Brigadir Usman dan Bripda Rendy Wijaya Pangestu duduk di hadapan panel telepon. Mereka adalah penjaga gerbang pertama antara kepanikan dan pertolongan.

Tombol jawab ditekan dan nomor telepon 110 yang dipanggil oleh Anggi menjawab. "Halo, Polresta Bareleng, ada yang bisa kami bantu?". 10 detik pertama telah dimulai dan dari sanalah segalanya berlangsung cepat, seperti detak jantung yang berlari.

Masyarakat mengenal 110 sebagai nomor ajaib. Tiga digit yang

menjanjikan kehadiran negara di saat genting. Tapi siapa yang menyangka sangkadi balik tiga digit itu, ada sistem bernama eskalasi, sebuah mekanisme yang memastikan tak ada panggilan jatuh ke ruang hampa.

Senin, 26 Januari 2026. Di Gedung Komisi III DPR RI, Jakarta. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, berdiri di hadapan para wakil rakyat. Ia bicara soal angka: 10 detik.

"Kami berikan waktu respons terhadap panggilan telepon 110 selama 10 detik. Ketika tidak diangkat, dia akan naik ke jenjang lebih tinggi. Dari polsek, polres, polda, sampai Mabes Polri," kata Kapolri.

Mekanisme ini seperti sistem peringatan dini yang tak pernah tidur. Jika di polsek tak ada yang menjawab, panggilan itu terbang ke polres. Jika di polres sibuk, ia melompat ke polda. Dan jika semua lini sedang tak beruntung, panggilan itu akan berakhir di Mabes Polri, di meja operator paling siaga. Tak ada alasan. Setiap dering adalah tanggung jawab berjenjang.

Dan di lapangan, standar berikutnya adalah 10 menit. Waktu yang dijanjikan untuk tiba di tempat kejadian. Itu standar yang digunakan PBB. Standar yang kini menjadi harga mati bagi setiap kendaraan patroli yang melesat di jalan raya.

Di ruang operator 110, teknologi bukan sekadar alat. Ia adalah saksi bisu sekaligus pengawas ketat.

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri, menjelaskan pada 12 Januari 2026: ada sebuah sistem aplikasi terintegrasi yang merekam setiap interaksi. Setiap ucapan, setiap laporan, setiap nada panik dari warga, terekam rapi dalam server.

"Sistem ini memungkinkan pencatatan atau perekaman setiap interaksi Polri dan masyarakat, sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap respons kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Artinya, jika ada laporan yang lambat ditindaklanjuti, rekaman digital itu akan bicara. Jika ada operator yang ketus atau lalai, jejak suaranya tak bisa dihapus. Sistem ini menjaga dua arah: masyarakat terlindungi, petugas pun juga terawasi.

Panggilan Prank

Tapi di balik dinginnya teknologi, ruang operator 110 tetap ruang yang hangat oleh kecemasan manusia. Mereka yang duduk di sana bukan sekadar penyambung telepon. Mereka adalah pendengar pertama dari ribuan cerita mencekam: ibu yang rumahnya kemasukan maling, remaja yang nyaris tabrak lari hingga saksi mata tawuran yang takut dikenali.

Namun, tak semua dering membawa cerita kemanusiaan. Ada juga dering yang tak ubahnya canda tawa yang sungguh tak bertanggung jawab. Di Polresta Tanjungpinang, hingga 30 Desember 2025, dari 942 panggilan yang masuk ke 110, sebanyak 692 di antaranya adalah panggilan prank. Tak ada laporan. Tak ada kejadian. Hanya iseng. Beberapa bahkan berasal dari luar kota -Lingga, Pekanbaru- seakan nomor 110 adalah mainan jarak jauh.

Jika ada operator yang ketus atau lalai, jejak suaranya tak bisa dihapus. Sistem ini menjaga komunikasi dua arah yang kredibel.

Polres Buleleng, Bali, mencatat hal lebih absurd. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, 89 persen panggilan adalah prank. Di antaranya, ada seorang warga yang menelepon minta polisi mengantarkan suratnya ke Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Setelah dilacak, yang bersangkutan ternyata mengalami gangguan jiwa. Namun tetap saja, panggilan itu menyita waktu operator yang

• mungkin saja saat itu sedang dibutuhkan oleh warga lain yang benar-benar sekarat.

• “Prank call ini sangat mengganggu. Bisa fatal akibatnya jika ada keadaan darurat sesungguhnya di waktu bersamaan,” ujar Iptu Yohana Rasalin Diaz, Kasi Humas Polres Buleleng.

• Polri tak tinggal diam. Imbauan terus digaungkan. Bahkan ancaman sanksi hukum pun



■ Layanan 110 membantu personel Polri datang ke TKP lebih cepat (ilustrasi)



■ Ruang komando untuk menerima panggilan 110

disampaikan. Karena di negara lain, menyalahgunakan layanan darurat adalah tindakan kriminal. Dan Indonesia, pelan tapi pasti, mulai menuju ke sana.

Integrasi Lintas Instansi

Tapi layanan 110 tak mau berhenti sebagai nomor polisi biasa. Kapolri, dalam kesempatan yang sama di DRI, menyampaikan visi besar: integrasi.

"Kami melakukan integrasi dengan Damkar, RSUD, hotline DPR RI, dan ke depan kami terus melakukan perbaikan dengan

menyusun berbagai macam regulasi," tegas Kapolri.

Bayangkan: sebuah kecelakaan terjadi di jalan raya. Satu panggilan ke 110, dan dalam hitungan menit, tidak hanya patroli polisi yang datang, tetapi ambulans dari RSUD terdekat juga bergerak. Jika ada kebakaran, pemadam kebakaran langsung dihubungi secara otomatis. Bahkan ojek online pun mulai dilibatkan, mungkin untuk antar obat atau jadi kurir darurat.

Inilah masa depan yang tengah dibangun: satu pintu darurat untuk semua kebutuhan

genting. Masyarakat tak perlu lagi mengingat banyak nomor cukup 110, dan negara akan mengerahkan semua lengan pertolongannya.

Kembali ke Batam, 22 Desember itu, panggilan Anggi berujung damai. Personel Polsek Lubuk Baja tiba di lokasi dan hal-hal buruk bisa dicegah. Beberapa hari kemudian, di ruang operator yang sama, Brigadir Usman menerima pesan singkat singkat dari Anggi: Hanya itu. Tapi bagi Usman, itu cukup. [*]

SPPG Polri dan Ikhtiar Negara Menjamin Gizi Anak Bangsa



Aroma masakan hangat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 13 Februari 2026. Di dapur seluas ratusan meter persegi itu, para petugas menyiapkan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah sebuah gambaran nyata kerja negara memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi.

Hari itu, Presiden meresmikan 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri, sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan 107 SPPG di berbagai daerah. Peresmian ini

menjadi bagian dari penguatan jaringan layanan gizi nasional yang dijalankan melalui kolaborasi pemerintah dan Polri.

Didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden meninjau langsung dapur, sistem pengolahan makanan, hingga fasilitas pendukung seperti kolam bioflok dan *greenhouse* hidroponik. Seluruhnya dirancang sebagai satu ekosistem: dari produksi bahan pangan hingga penyajian makanan bergizi yang higienis.

Dalam laporannya, Kapolri menegaskan keterlibatan Polri bukan sekadar dukungan administratif, melainkan bagian dari

tanggung jawab untuk memastikan kualitas hidup masyarakat.

"Melalui penguatan SPPG Polri dan dukungan infrastruktur ketahanan pangan, Polri berkomitmen menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang aman, bermutu dan merata, sekaligus memperkuat ekosistem pangan dari hulu sampai hilir, sehingga benar-benar memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi emas penerus bangsa," ujar Kapolri.

Secara keseluruhan, Polri kini memiliki 1.179 SPPG, dengan rincian 419 telah beroperasi, 162 dalam tahap persiapan, 499 dalam proses pembangunan, dan 107 baru memasuki tahap *groundbreaking*. Jika seluruhnya beroperasi, fasilitas tersebut diproyeksikan melayani hampir 3 juta penerima manfaat setiap hari serta menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

"Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja," jelas Kapolri.

Sebanyak 33 SPPG dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Papua. Pada 2026, Polri menargetkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi.

Dalam pelaksanaannya, Polri menempatkan standar mutu, higienitas, dan keamanan pangan sebagai prioritas. Hingga kini, 201 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik *Higiene* Sanitasi, 119 memiliki Sertifikat Halal, dan 147 memiliki Sertifikat Uji Laboratorium.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Polri juga membangun 18 gudang logistik di 12 Polda dengan kapasitas hingga 1.000 ton per gudang. Pada 2026, jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 28 gudang, termasuk fasilitas berkapasitas besar di wilayah Polda Metro Jaya.



■ Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke SPPG didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

Apresiasi Presiden

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polri yang dinilai mampu menangkap isu strategis bangsa di luar tugas utama kepolisian.

"Saya melihat Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif pada bidang yang mungkin terlihat bukan tugas pokoknya, tetapi justru menyentuh persoalan krusial bagi keselamatan bangsa," ujarnya.

Ia menekankan bahwa penguatan gizi masyarakat merupakan investasi

jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut Presiden, telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan mulai menarik perhatian dunia internasional.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Kapolri memeriksa kondisi SPPG Polri sekaligus mengecek dapur yang terlihat bersih dan seluruh proses dilakukan secara higienis. Presiden juga melihat langsung

proses memasak makanan yang akan didistribusikan kepada para siswa pada hari itu.

Rombongan kemudian diajak berkeliling ke *greenhouse* yang berada di area SPPG Palmerah. Di lokasi tersebut terdapat delapan kolam ikan yang berisi patin, mujair, hingga nila, serta berbagai tanaman sayur yang dibudidayakan secara hidroponik.

Di penghujung acara, Presiden menekan kubus LED dan menandatangani prasasti,





menandai dimulainya operasional dan pembangunan jaringan SPPG serta gudang ketahanan pangan Polri di seluruh Indonesia.

SPPG Polri juga mendapat apresiasi dari kalangan pengamat karena dinilai telah menerapkan standar operasional yang baik dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi. Aspek keamanan pangan, disiplin SOP, kebersihan peralatan, komunikasi dengan penerima manfaat, hingga pengujian pencegahan keracunan dinilai telah berjalan.

Program ini tidak hanya mendukung penanganan *stunting*, tetapi juga berkontribusi pada pendidikan gizi dan pengendalian penyakit. Dengan pendekatan hulu ke hilir serta evaluasi berkelanjutan, pelaksanaannya diharapkan tetap berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Dari perspektif kebijakan publik, SPPG Polri berpotensi menjadi rujukan pelaksanaan program serupa di daerah lain, terutama dalam hal standar layanan dan tata kelola. Transparansi program juga

dinilai kuat karena kualitas layanan dapat dipantau langsung oleh para penerima manfaat.

Program ini pada akhirnya bukan hanya soal dapur dan distribusi makanan, tetapi tentang bagaimana negara hadir memastikan kualitas generasi yang akan tumbuh di masa depan. [*]



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Menjaga Akses Kesehatan Buruh, Polri Buka Faskes bagi Peserta BPJS



■ Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)

Di tengah dinamika layanan kesehatan nasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta fasilitas kesehatan milik Polri dapat dimanfaatkan oleh buruh peserta BPJS Kesehatan. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri peringatan HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.

Arahan tersebut muncul sebagai upaya memperluas pilihan layanan kesehatan bagi kalangan pekerja.

"Terkait dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang saat ini dikelola dengan menggunakan

BPJS Kesehatan, mungkin juga nanti Pak Kapusdokkes, teman-teman buruh kalau memang akan memanfaatkan fasilitas kesehatan kita, mungkin juga bisa dibantu," kata Kapolri.

Ia meminta Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri mengecek kesiapan fasilitas kesehatan yang dapat digunakan untuk membantu buruh.

"Tolong dicek sehingga kemudian ada pilihan-pilihan yang lebih banyak untuk rekan-rekan buruh terkait dengan masalah kesehatannya," ujarnya.

Kapolri juga mempersilakan buruh menggunakan fasilitas kesehatan Polri di berbagai wilayah, terutama di daerah yang membutuhkan tambahan layanan.

"Terhadap rekan-rekan buruh yang mendapatkan pelayanan BPJS, silakan apabila akan menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan milik Polri di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang memang di situ dibutuhkan pelayanan dari teman-teman serikat buruh," terangnya.

Kebijakan ini mengemuka di tengah polemik penonaktifan

BUNGA RAMPAI

sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial. Langkah pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi tersebut memicu keresahan karena berdampak langsung pada warga tidak mampu yang mendadak kehilangan akses layanan kesehatan.

Salah satu potret yang mencuat adalah kasus Afsal, balita tiga tahun asal Garut penderita kanker ginjal. Ia terpaksa menghentikan jadwal kemoterapi di sebuah rumah sakit di Bandung setelah status kepesertaan BPJS PBI-nya

tidak aktif. Keluarga mengaku kesulitan karena pengobatan yang selama ini bergantung pada jaminan kesehatan negara tiba-tiba terputus.

Kasus tersebut menjadi salah satu contoh warga yang tercoret dari daftar penerima bantuan karena dinilai telah mengalami peningkatan taraf ekonomi. Situasi ini memicu respons DPR yang memanggil kementerian terkait untuk meminta penjelasan.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa transformasi data dilakukan

untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun pelaksanaannya dinilai menimbulkan kepanikan karena dilakukan secara serentak tanpa sosialisasi memadai.

Menjaga Akses Layanan

Di tengah situasi tersebut, pembukaan akses fasilitas kesehatan Polri bagi peserta BPJS dipandang sebagai langkah yang memberi ruang tambahan bagi masyarakat, khususnya buruh, untuk tetap memperoleh layanan kesehatan.





“Saya kira ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk juga memberikan pelayanan terhadap hal-hal yang memang harus kita berikan. Dan ini juga menjadi program dari pemerintah yang kita tindak lanjuti,”

- Kapolda Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Kapolda menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Polri mendukung program pemerintah dalam pelayanan kesehatan.

“Saya kira ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk juga memberikan pelayanan terhadap hal-hal yang memang harus kita berikan. Dan ini juga menjadi program dari pemerintah yang kita tindak lanjuti,” tutur Kapolda.

Selain layanan kesehatan, Polri juga diminta terus memberikan pendampingan kepada buruh melalui Desk Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Desk ketenagakerjaan, tolong betul-betul diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi rekan-rekan buruh, khususnya yang berdampak PHK,” ujarnya.

Pendampingan tersebut mencakup mitigasi persoalan ketenagakerjaan, perlindungan hak pekerja, hingga menjaga hubungan industrial tetap stabil.

Tak Sekadar Layanan Medis

Ditengah-tengah tekanan ekonomi global dan dinamika ketenagakerjaan, Kapolda menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan buruh tetap menjadi perhatian bersama.

“Di hari ulang tahun yang ke-53 ini, harapan kita perjuangan rekan-

rekan semua, perjuangan rekan-rekan buruh untuk mewujudkan buruh yang sejahtera, tentunya ini menjadi perjuangan kita bersama. Oleh karena itu, Polri tentunya akan terus mendukung apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan buruh semua,” katanya.

Pembukaan akses fasilitas kesehatan Polri bagi peserta BPJS menjadi penanda bahwa layanan kesehatan tidak hanya bertumpu pada satu sistem, tetapi diperkuat melalui kolaborasi lintas institusi.

Bagi buruh, pilihan layanan yang lebih luas berarti jaminan bahwa kebutuhan kesehatan tetap bisa diakses.

Sementara bagi Polri, langkah ini menegaskan peran yang lebih luas—hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat tetap terlindungi dalam kebutuhan paling mendasar: kesehatan. [*]

Satgas Pangan Polri Kawal Harga Jelang HBKN 2026

Di pasar rakyat selalu menyimpan satu pertanyaan yang sama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN): apakah harga hari ini masih bisa dijangkau?

Di antara tumpukan beras, telur, daging, dan cabai, dinamika pasar mulai berubah setiap memasuki Imlek, Ramadan hingga Idulfitri. Permintaan meningkat, distribusi sering tertekan, dan celah permainan harga terbuka. Pada titik inilah peran negara diuji bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan dapur masyarakat tetap menyala.

Melalui Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan, Polri bersama kementerian/lembaga terkait bergerak melakukan pengawasan nasional menjelang HBKN 2026.

Sejak 5–11 Februari 2026, pengawasan dilakukan di 9.138 titik yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pemantauan mencakup seluruh rantai distribusi pangan, mulai dari pedagang dan pengecer, ritel modern, grosir, distributor, produsen, hingga agen.

Pengawasan Rantai Distribusi

Sebagian besar pemantauan dilakukan pada pedagang dan pengecer karena sektor ini paling langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari total titik pengawasan, lebih dari separuh berada pada lapisan distribusi paling hilir tersebut.

Pendekatan ini penting karena lonjakan harga sering kali terjadi bukan hanya akibat keterbatasan stok, tetapi juga gangguan distribusi dan praktik spekulatif.

Hasil pemantauan menunjukkan tren stabilisasi pada sejumlah komoditas strategis, terutama beras medium, telur ayam ras, dan daging ayam. Namun, beberapa komoditas masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP), seperti minyak goreng Minyakita, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, serta gula konsumsi di sejumlah wilayah.



BUNGA RAMPAI



Peran utama pengawasan berada di tangan jajaran kepolisian daerah yang turun langsung ke pasar rakyat. Di Sulawesi Tenggara, misalnya, Satgas Pangan Polda Sultra memantau harga di Pasar Mandonga, Kota Kendari.

Harga beras medium tercatat Rp13.600/kg, mendekati batas bawah HET nasional. Namun minyak goreng Minyakita berada pada kisaran Rp16.000–Rp16.500/liter, sedikit melampaui HET Rp15.700/liter. Bawang merah dijual Rp40.000–Rp42.000/kg, sebagian melewati HAP nasional, sementara bawang putih Rp40.000/kg berada di batas atas acuan.

Peran utama pengawasan berada di tangan jajaran kepolisian daerah yang turun langsung ke pasar rakyat.

Pemantauan serupa dilakukan di Lampung. Di Pasar Way Jepara, harga beras medium Rp12.993/kg masih di bawah HET nasional. Daging ayam ras Rp35.000/kg dan daging sapi Rp125.000/kg juga berada di bawah HAP. Cabai rawit merah Rp51.000/kg dan cabai merah keriting Rp40.667/kg masih dalam rentang acuan nasional, sementara gula konsumsi Rp17.000/kg sedikit di bawah batas harga.

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pasar tidak bergerak seragam. Di beberapa

wilayah harga terkendali, sementara di wilayah lain masih terjadi tekanan harga.

Menjaga Stabilitas, Menjaga Kepercayaan

Pengawasan tidak berhenti pada pencatatan harga. Sepanjang periode pemantauan, Satgas menerbitkan 128 surat teguran kepada pelaku usaha, mengisi 400 titik stok kosong, serta mengambil 33 sampel pangan untuk diuji di laboratorium.

Selain itu, dikeluarkan rekomendasi pencabutan 1 izin



usaha dan 2 izin edar karena pelanggaran terhadap ketentuan harga maupun standar keamanan pangan.

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menegaskan pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Kepada seluruh Satgas, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, agar tidak ragu menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga, keamanan, dan mutu pangan sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Pengawasan pangan menjelang HKBN bukan sekadar operasi

musiman. Stabilitas harga bahan pokok berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan ketenangan sosial. Lonjakan harga yang tidak terkendali dapat memicu keresahan, sementara kelangkaan pasokan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi lokal.

Karena itu, kerja Satgas Pangan menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Pengawasan distribusi, penegakan hukum, dan stabilisasi harga berjalan beriringan sebagai upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Di tengah hiruk pikuk pasar, kehadiran negara mungkin tidak

selalu terlihat. Namun dampaknya terasa ketika harga tetap terkendali, stok tersedia, dan masyarakat dapat berbelanja tanpa kekhawatiran.

Pada akhirnya, menjaga pangan bukan sekadar urusan logistik. Ini tentang menjaga kepercayaan masyarakat bahwa kebutuhan paling dasar mereka tetap terlindungi, bahkan di tengah lonjakan permintaan terbesar sekalipun. [*]



Warung Tanpa Harga di Taman Pandanalas

Aroma nasi hangat dan sayur sederhana menyeruak di Taman Pandanalas, Boyolali, pada pagi yang dipilih khusus setiap bulannya. Di antara lalu-lalang warga dan deru kendaraan, sebuah warung makan berdiri dalam bentuk paling sederhana beberapa meja tanpa papan harga, tanpa daftar menu berbayar, tanpa kasir. Yang ada hanya senyum, sapaan ramah, dan sepiring makanan yang boleh disantap siapa saja secara cuma-cuma.

Di balik meja saji itu, sepasang suami istri berseragam cokelat tampak sibuk melayani warga yang datang silih berganti. Tangan mereka bergantian menyendok nasi, menata lauk, lalu menyerahkan piring kepada siapa pun yang mengantre. Sesekali mereka menyapa, menanyakan kabar, atau sekadar tersenyum kecil seperti pelayan warung makan pada umumnya.

Namun, pasangan itu bukan pengelola warung biasa. Seragam yang mereka kenakan adalah seragam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mereka adalah Iptu Agung Muryo Atmojo dan istrinya, Aipda Sab'atun Hasanah, anggota Polres Boyolali.

Setiap bulan, keduanya rutin membuka warung makan gratis di taman kota itu. Sejak pagi, sekitar pukul 07.00, ratusan hingga ribuan



porsi makanan sederhana disiapkan nasi putih, sayur, dan lauk rumahan. Tak ada syarat, tak ada pembatas. Siapa pun boleh datang dan makan.

Meski tampak sederhana, pemilihan menu tidak dilakukan asal. Keduanya tetap memperhatikan kandungan gizi dalam setiap porsi yang dibagikan.

“Menu yang kami sajikan itu bukan menu yang wah, tapi kami tetap memikirkan gizinya. Harus ada protein, karbohidrat, serat,” kata Iptu Agung.



Dari Dapur Rumah

Aktivitas di balik meja saji itu bermula dari dapur rumah mereka sendiri. Iptu Agung dan Aipda Sab'atun memiliki usaha catering rumahan bernama Berkah 47 Catering. Dari dapur itulah mereka menyiapkan pesanan harian sekaligus makanan untuk kegiatan sosial yang kini menjadi rutinitas.

Warung makan gratis itu bukan bagian dari agenda resmi kedinasan, bukan pula program seremonial. Ia lahir dari keputusan personal dari ruang keluarga, dari pengalaman hidup, dan dari keinginan sederhana untuk berbagi.

Jauh sebelum mengenakan seragam polisi, Iptu Agung pernah merasakan hidup serba pas-pasan saat bekerja sebagai buruh pabrik di Jakarta. Pengalaman hidup dalam keterbatasan itu membuatnya memahami bahwa sepiring makanan sederhana bisa berarti sangat besar bagi orang lain.

“Menu yang kami sajikan itu bukan menu yang wah, tapi kami tetap memikirkan gizinya. Harus ada protein, karbohidrat, serat,”

- Iptu Agung Muryo Atmojo

INSPIRATIF

“Dari dulu, waktu saya masih susah dan kerja di pabrik, saya merasakan betapa sulitnya hidup tanpa uang di Jakarta. Dari situ muncul keinginan untuk berbagi,” ujarnya.

Untuk menjalankan kegiatan itu, keduanya tidak bergantung pada donasi. Seluruh biaya dipenuhi secara mandiri dari gaji sebagai anggota Polri hingga keuntungan usaha katering. Bahkan, tabungan yang semula disiapkan untuk perjalanan ibadah umrah sempat dialihkan untuk memulai warung makan gratis tersebut.

“Seharusnya biaya umrah dipakai untuk itu. Saya yakin rezeki tidak akan tertukar. Niat ke Tanah Suci mungkin hanya soal waktu, tapi niat berbagi ini tidak boleh berhenti,” kata Iptu Agung.

“Seharusnya biaya umrah dipakai untuk itu. Saya yakin rezeki tidak akan tertukar. Niat ke Tanah Suci mungkin hanya soal waktu, tapi niat berbagi ini tidak boleh berhenti,”





Bertemu Tanpa Jarak

Di balik aktivitas berbagi makanan, ada hal lain yang tumbuh perlahan—kedekatan. Warung makan gratis itu menjadi ruang perjumpaan antara polisi dan masyarakat dalam suasana yang hangat dan tanpa sekat.

Di sela melayani, Iptu Agung kerap berbincang ringan dengan warga. Kadang menanyakan lauk yang diinginkan, kadang mengingatkan pengendara untuk memakai helm.

"Seninya itu seni melayani. Sambil tanya, 'Bapak mau lauk apa, telur atau ayam? Oh ya, tadi nggak pakai helm. Besok dipakai ya, Pak'. Minggu berikutnya dia datang lagi, 'Pak saya sudah pakai helm, boleh bungkus?' Ya silakan, munggo," ujarnya.

Interaksi sederhana itu membuat hubungan terasa lebih dekat. Sepiring nasi tak hanya mengenyangkan, tetapi juga menjadi ruang untuk saling mengenal, berbincang, dan membangun kepercayaan.

Kegiatan berbagi yang dimulai sejak 2024 ini kini tak hanya berlangsung sebulan sekali di taman kota. Setiap Jumat, pasangan ini juga menyiapkan ratusan porsi makanan untuk dibagikan di masjid terdekat. Setiap tiga bulan sekali, mereka menyempatkan diri mendatangi panti asuhan dan pondok pesantren di sekitar Boyolali.

Bagi Iptu Agung dan Aipda Sab'atun, berbagi bukan kegiatan sesaat, melainkan kebiasaan yang terus dirawat. Sepiring nasi mungkin tampak sederhana, tetapi bagi mereka, itu adalah cara paling nyata untuk hadir di tengah masyarakat.

Di Taman Pandanalas, warung tanpa harga itu terus berdiri setiap bulannya. Tanpa tarif, tanpa jarak, tanpa formalitas. Hanya ada dua hal yang selalu sama: kehadiran, dan niat untuk berbagi. [*]

Di Rumah Bambu Itu,

Sang Bhabinkamtibmas Selalu Hadir





Rumah satu petak yang berdiri di antara rimbunnya pohon bambu di Dusun Keper, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, hampir tak pernah luput dari langkah Brigpol Herlambang Wahyu Anafis Satriatama. Setiap hari, anggota Bhabinkamtibmas Polres Bangkalan itu menyusuri jalan kecil menuju rumah tersebut untuk memastikan sang penghuni baik-baik saja.

Rumah berbilik bambu yang mulai rapuh dimakan usia itu menjadi tempat Sukri (65), seorang lansia tuna netra, menghabiskan masa tuanya seorang diri setelah istrinya meninggal dunia. Dalam keterbatasan penglihatan, hari-harinya ia jalani dengan mengandalkan suara dan ingatan, berteduh di rumah berlantai tanah yang jauh dari kata layak.

Sebelum mengenal Brigpol Anafis, kehidupan Sukri berjalan dalam sunyi. Ia mengandalkan uluran tangan tetangga untuk makan, bahkan tak jarang harus menahan lapar ketika tak ada yang datang membantu.

Kondisi itulah yang kemudian mengetuk hati Brigpol Anafis. Sebagai Bhabinkamtibmas-polisi yang bertugas paling dekat dengan warga- ia merasa tak cukup hanya hadir menjaga keamanan. Ia memilih hadir sebagai manusia yang peduli.

Sejak 2023, hampir setiap hari ia datang membawa makanan, menyapa, dan memastikan Sukri tetap menjalani hari-harinya dengan layak. "Sejak 2023 itu, setiap hari saya ke sini antar makanan sampai hari ini. Apa pun kondisinya selalu saya smpatkan," kata Brigpol Anafis.

Kunjungan itu perlahan menjadi rutinitas yang bukan hanya mengisi perut, tetapi juga mengisi ruang kosong dalam hidup Sukri. Setiap nasi yang dibawanya selalu datang bersama waktu sejenak untuk berbincang, mendengar cerita, dan memastikan sang kakek tidak merasa sendiri.

Dalam keseharian Sukri, Brigpol Anafis tak hanya membawa makanan. Ia membantu hal-hal kecil yang tak lagi sanggup dilakukan sang lansia—membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga memastikan kebutuhan listrik tetap terpenuhi. Bahkan, ia pernah menelusuri jalur kabel hingga ke area hutan untuk mencari penyebab padamnya listrik di rumah Sukri yang telah berlangsung bertahun-tahun, hingga akhirnya listrik kembali menyala. “Kalau beliau sakit, juga saya belikan obat,” kata Brigpol Anafis.

Sebelum itu, kehidupan Sukri benar-benar jauh dari kata nyaman. “Sebelumnya untuk makan ya menunggu dari tetangganya. Kadang juga sering puasa kalau tidak ada makanan,” terang Brigpol Anafis.

“Kalau beliau sakit, juga saya belikan obat,”

- Brigpol Herlambang Wahyu Anafis Satriatama

Kepedulian Sejak Awal

Kepedulian Brigpol Herlambang terhadap masyarakat bukanlah hal yang muncul tiba-tiba. Jauh sebelum rutin mendampingi Sukri, ia telah aktif menginisiasi kegiatan sosial di wilayah binaannya. Pada 2021, saat masih berpangkat Bripda, ia menggagas “Rumah Belajar” bagi anak-anak di Desa Sembilangan, Bangkalan, yang kesulitan mendapatkan akses pembelajaran tambahan.

Program itu lahir dari kegelisahannya melihat masih

banyak siswa di pelosok desa yang belum memperoleh fasilitas belajar memadai. Dengan memanfaatkan sarana sederhana termasuk mobil dinas Bhabinkamtibmas dan dukungan layar LCD ia memberikan pelajaran dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak.

Rumah Belajar tersebut dibuat dengan konsep alam agar anak-anak bisa belajar dengan leluasa. Kegiatan itu menjadi ruang alternatif bagi siswa sekolah dasar



untuk mendapatkan pengetahuan tambahan sekaligus motivasi agar terus menuntut ilmu dan meraih cita-cita.

“Alhamdulillah, Rumah Belajar ini memang dibuat dengan konsep alam agar anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan lebih. Ini agar mereka termotivasi untuk mewujudkan cita-cita mereka,” ujar Brigpol Anafis.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam mendukung pendidikan dan masa depan generasi muda di wilayah binaan.

Hadir sebagai Sahabat

Seiring waktu, langkah kecil Brigpol Anafis di rumah Sukri menjadi rutinitas yang tak terpisahkan dari kesehariannya. Dari yang sebelumnya sunyi, kini ada sosok yang datang setiap hari. Dari yang sebelumnya gelap, kini lampu kembali menyala. Dari yang sebelumnya bergantung pada keadaan, kini ada seseorang yang memastikan ia tetap bertahan.

Bagi Sukri, Brigpol Anafis bukan sekadar aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Ia telah menjelma menjadi sahabat, bahkan keluarga, yang selalu dinanti kehadirannya.

“Saya hidup di rumah kecil ini tanpa teman. Adanya Pak Bhabin membuat saya punya teman untuk cerita dan berbicara. Saya senang setiap dia datang,” kata Sukri.

Di balik seragam yang dikenakan, langkah kecil yang dilakukan Brigpol Anafis menunjukkan bahwa tugas kepolisian tak selalu hadir dalam bentuk operasi besar. Kadang, ia hadir dalam bentuk paling sederhana datang, menyapa, dan memastikan seseorang tidak merasa sendirian.

Dan di rumah bambu itu, langkah tersebut terus datang setiap hari. [*]





Janji yang Ditepati di Ruang Belajar Sederhana





Seore hari di sebuah mushola sederhana, suara anak-anak mengeja huruf demi huruf Al-Qur'an terdengar bersahut-sahutan. Tidak ada meja belajar rapi, tidak pula ruang kelas khusus. Sebagian duduk di lantai, sebagian lagi belajar di pelataran terbuka. Di tengah mereka, seorang anggota Brimob duduk bersila, membimbing satu per satu dengan sabar.

Baginya, kegiatan mengajar mengaji bukan sekadar aktivitas di luar jam dinas. Ia adalah janji hidup.

Janji itu lahir dari peristiwa yang tak pernah ia lupakan. Pada tragedi tsunami Aceh 2004, ia terseret arus dan akhirnya terdampar di atas kubah masjid di Kecamatan Arongan, Aceh Barat. Di momen antara hidup dan mati itu, ia berdoa dan berjanji.

"Ya Allah, izinkan saya hidup. Jika Engkau beri kesempatan, saya akan mengabdikan diri untuk negara dan agama."

Sejak saat itu, hidupnya terasa seperti kesempatan kedua.



Perjalanan yang Sulit

Masa kecilnya pun tidak lepas dari peristiwa yang membekas. Ia pernah tenggelam saat banjir dan dinyatakan hilang selama berjam-jam. Orang-orang mengira ia telah meninggal, namun takdir berkata lain. Ia kembali selamat.

Figur yang paling memengaruhi jalan hidupnya adalah sang kakek seorang pejuang yang mendirikan madrasah kecil tanpa mengharapkan imbalan. Keteladanan itulah yang menanamkan keyakinan bahwa ilmu agama harus dibagikan, bukan disimpan sendiri.

Nilai itu terus ia bawa hingga dewasa, hingga akhirnya berseragam Brimob.

Kegiatan mengajar mengaji bermula dari kegelisahan sederhana. Ia melihat banyak anak yang sudah memasuki usia baligh, tetapi belum mampu membaca Al-Qur'an.

Dari situ, ia mulai mengumpulkan anak-anak di masjid dan mushola. Awalnya hanya beberapa orang. Lama-lama bertambah. Tanpa papan nama, tanpa lembaga resmi, tanpa biaya.

Setiap sore setelah jam dinas, ia datang mengajar. Di hari libur, kegiatan tetap berjalan. Ia berusaha menjaga keseimbangan antara tugas sebagai anggota Brimob dan panggilan jiwa untuk mendidik anak-anak.

Tantangan tentu ada. Waktu harus dibagi. Fasilitas terbatas. Bahkan kendaraan untuk menjangkau lokasi pedesaan sering menjadi kendala. Sebagian anak juga kerap absen karena harus membantu orang tua bekerja.

Namun semangat belajar anak-anak selalu menjadi alasan untuk tetap bertahan.

Belajar di Lapangan

Tak jarang proses belajar berlangsung di ruang terbuka. Di pelataran, di halaman mushola, atau di tempat seadanya. Meski sederhana, suasana itu justru menjadi momen paling berkesan.

Semangat anak-anak untuk tetap belajar membuat setiap pertemuan terasa berarti.

Perubahan mulai terlihat perlahan. Anak-anak yang dulu belum bisa membaca Al-Qur'an mulai lancar. Sikap mereka berubah lebih sopan, lebih menghormati orang tua, lebih memahami mana yang benar dan mana yang salah. Bagi dirinya, itu adalah hasil yang tak ternilai.

Kegiatan tersebut tidak berjalan sendiri. Dukungan dari satuan, terutama Komandan Batalyon, menjadi penguat langkahnya. Ia diberi ruang untuk tetap mengajar selama tidak mengganggu tugas kedinasan. Dukungan itu menjadi energi untuk terus istiqamah.

Di luar kegiatan belajar, ia juga aktif berada di tengah masyarakat. Mengajar mengaji, menjadi imam, ikut yasinan, hingga gotong royong bersama warga. Kedekatan itu membuat masyarakat menerima kehadirannya bukan hanya sebagai aparat, tetapi sebagai bagian dari lingkungan.



Mengabdikan dalam Dua Jalan

Baginya, menjadi anggota Brimob bukan hanya tentang operasi atau penegakan hukum. Ada ruang lain yang sama penting hadir sebagai pendidik, sahabat, dan pengingat.

Ia percaya, membangun kedekatan dengan masyarakat bisa dimulai dari hal-hal sederhana: pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kepedulian sosial.

Ke depan, ia berharap kegiatan ini bisa berkembang. Melibatkan lebih banyak ustaz, pengurus masjid, dan masyarakat, agar pembelajaran tetap berjalan meski dirinya sedang bertugas di luar daerah.

Harapannya sederhana: semakin banyak anak yang bisa membaca Al-Qur'an dan tumbuh dengan akhlak yang baik.

Dari sekian banyak tugas yang dijalani, kebanggaan terbesarnya bukan pada operasi atau penghargaan. Melainkan ketika ia melihat masyarakat semakin taat hukum dan semakin dekat dengan nilai agama.

Baginya, amanah sebagai anggota Brimob adalah jalan untuk membawa manfaat.

"Dengan seragam ini, saya lebih mudah diterima masyarakat. Saya bisa mengajak mereka berbuat baik, menjaga ketertiban, dan memahami ajaran agama. Kebanggaan terbesar saya adalah ketika kehadiran saya membawa perubahan positif bagi lingkungan."

Di sore hari itu, suara anak-anak kembali terdengar mengeja ayat demi ayat.

Di ruang belajar sederhana itu, sebuah janji yang lahir dari tragedi puluhan tahun lalu terus ditepati pelan, konsisten, dan penuh keikhlasan. [*]



Manuver Udara Ekstrem untuk Misi Kemanusiaan

Banjir yang menggenang sejak akhir tahun 2025 masih melanda sejumlah wilayah di Sumatra, termasuk Aceh Tamiang. Hampan air kecokelatan membentang luas, menyisakan lumpur tebal dan permukaan yang tak lagi bisa dijadikan pijakan.

Angin berdesir kencang di atas genangan, sementara dari ketinggian rendah baling-baling helikopter memecah udara, menimbulkan pusaran yang menyebarkan air dan lumpur banjir. Tak ada tanah kering, tak ada lapangan pendaratan hanya bayangan besi terbang yang mengambang di atas permukaan air. Di bawahnya, warga menengadahkan, menanti bantuan yang datang bukan dengan mendarat, melainkan dijatuhkan dari langit.

Dalam kondisi ekstrem itulah helikopter Polisi Udara Baharkam Polri menjalankan misi kemanusiaan, menyalurkan bantuan logistik bagi warga Aceh Tamiang yang terdampak banjir. Pasca banjir besar, seluruh area dinyatakan tidak layak untuk pendaratan. Lumpur tebal, genangan air, serta keterbatasan jarak pandang membuat opsi mendarat mustahil dilakukan, sementara kebutuhan warga akan bantuan tak bisa menunggu.



Di Tengah Medan Mustahil

Keputusan pun diambil cepat. Bantuan harus tetap dikirim melalui air dropping, menjatuhkan logistik dari helikopter yang melakukan manuver hover rendah. Manuver ini bukan tanpa risiko. Helikopter harus “mengambang” stabil di udara, menjaga ketinggian dan posisi agar paket bantuan jatuh tepat sasaran tanpa membahayakan warga di bawah.

Di balik manuver presisi tersebut, ada tim kecil yang bekerja dalam keheningan kokpit, menakar risiko di setiap detik penerbangan. Helikopter Polisi Udara Baharkam Polri diawaki empat personel berpengalaman. AKBP Dian Didik Arvianto bertugas sebagai pilot yang mengendalikan penuh manuver helikopter di tengah angin kencang

dan jarak pandang terbatas. Ia didampingi Iptu Vidya H. Mangundjaya sebagai kopilot yang membantu pemantauan kondisi udara sekaligus memastikan prosedur keselamatan penerbangan berjalan. Di bagian kabin, Aipda Sanioko dan Bripka Kukuh Wahyu memastikan paket logistik siap dijatuhkan serta mengamati kondisi di darat agar proses distribusi tidak membahayakan warga.

“Pada saat itu kita mendapatkan order flight ke daerah Aceh Tamiang. Kami menerima satu titik koordinat untuk melaksanakan dropping logistik,” ujar AKBP Dian Didik Arvianto. Titik tersebut kemudian dipetakan dan diketahui berada di Kampung Landu, salah satu wilayah yang terdampak parah banjir.

Sebelum terbang, tim sempat mengupayakan koordinasi terkait lokasi pendaratan. Namun sesampainya di lokasi, kondisi lapangan tak memungkinkan sama sekali. “Di area tersebut, minim sekali tempat untuk bagi kami untuk mendarat. Karena lokasi yang sebagian besar berlumpur,” kata AKBP Dian Didik Arvianto.



B UAH BIBIR

Setelah memastikan tidak ada area yang memenuhi syarat pendaratan, opsi air dropping menjadi satu-satunya cara agar bantuan tetap tersalurkan. "Karena tidak ada tempat yang layak dan proper untuk mendarat, akhirnya kami memutuskan melakukan air dropping sebagai teknis pendistribusian logistik," ujar Dian.

Dengan perhitungan matang, helikopter menahan posisi di ketinggian rendah selama kurang lebih lima menit penjatuhan logistik, memastikan bantuan sampai tanpa menimbulkan risiko tambahan bagi warga.

Setiap detik helikopter bertahan di ketinggian rendah membawa risiko tinggi. Hembusan angin dari putaran baling-baling menciptakan downwash yang dapat mengganggu stabilitas penerbangan, sementara cipratan air bercampur lumpur berisiko menghantam kaca depan dan membatasi jarak pandang. Dalam kondisi cuaca tak menentu dan medan yang sepenuhnya tergenang, awak udara dituntut menjaga konsentrasi penuh agar helikopter tetap seimbang dan proses penjatuhan bantuan berlangsung aman.

Manuver Ekstrem

Aksi tersebut kemudian menyita perhatian publik. Rekaman manuver helikopter yang melayang rendah di atas genangan banjir beredar luas di media sosial. Video dan foto misi kemanusiaan itu menjadi viral, menuai beragam respons dari warganet yang mengapresiasi keberanian serta ketepatan awak Polisi Udara Baharkam Polri dalam menjalankan tugas.

Manuver hover rendah dinilai bukan operasi biasa, karena membutuhkan keterampilan terbang tingkat tinggi, perhitungan teknis presisi, serta keberanian mengambil risiko di tengah angin kencang dan jarak pandang terbatas.

Tidak hanya di dalam negeri, aksi tersebut juga mendapat sorotan dari media luar negeri. Melalui akun X RussiaNews (@mog_russEN), mereka mengunggah video helikopter tersebut dan menyoroti kemampuan helikopter jenis AgustaWestland AW169 milik Polri yang tetap beroperasi di tengah kondisi cuaca ekstrem dan medan sulit sebagai bagian dari misi kemanusiaan. [*]



POLISI INSPIRATIF

AKBP DIAN DIDIK ARVIANTO - SOSOK
DI BALIK VIRAL HELI TERBANG
RENDAH



KENDARAAN FIT, LIBURAN WORTH IT



Cek lampu rem sebelum melakukan perjalanan



Lakukan penambahan angin jika dirasa kurang tekanan angin pada ban



Cek kendaraan sebelum berangkat meliputi air radiator dan oli mesin



Cek lampu utama sebelum melakukan perjalanan



Lakukan pengecekan karet wiper apakah mampu berfungsi dengan baik



INOVASI DIVHUMAS

Biro Penmas Polri
Majalah Tribrata News
Tersedia Online



www.humas.polri.go.id